



LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN 1 TAHUN 2018

Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan
Peneliti pada Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal
Badan Keahlian DPR RI

Oleh :

MASYITHAH AULIA ADHIEM, S.Si., M.E.

NIP. 198306032018012002

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018



LAPORAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN 1 TAHUN 2018

**Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan
Peneliti pada Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal
Badan Keahlian DPR RI**

Oleh :

MASYITHAH AULIA ADHIEM, S.Si., M.E.

NIP. 198306032018012002

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN I TAHUN 2018

Nama : Masyithah Aulia Adhiem
NIP : 198306032018012002
Jabatan : Calon Peneliti
Instansi : Pusat Penelitian Badan Keahlian
DPR RI

Kopo, Oktober 2018

Mengetahui,
Coach



DR. Ujianto Singgih P., M.Si.
NIP. 196411191990031003

Menyetujui,
Mentor



Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
NIP. 197205111999031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. NILAI-NILAI ORGANISASI.....	5
C. TUJUAN.....	7
BAGIAN II DESKRIPSI ISU.....	8
A. PENJELASAN PERUBAHAN.....	8
B. CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	9
C. ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK.....	10
D. TANTANGAN/HAMBATAN.....	10
BAB III.....	12
JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI.....	12
BAGIAN IV PENUTUP.....	18
A. KESIMPULAN.....	18
B. SARAN.....	24

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Keahlian DPR RI memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian, sesuai dengan Peraturan Presiden No.27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI tersebut, maka dibentuk pusat-pusat yaitu:

1. Pusat Perancangan Undang-Undang (UU) dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada perancangan UU.
2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pemantauan pelaksanaan UU dan pemberian keterangan DPR untuk persidangan Mahkamah Konstitusi.
3. Pusat Kajian Anggaran dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis anggaran.
4. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis akuntabilitas keuangan negara.
5. Pusat Penelitian dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memiliki visi Menjadi Pusat Penelitian yang professional, netral, andal, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern. Untuk mendukung visi tersebut maka misi dari Pusat Penelitian BK DPR RI adalah: (1) Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang professional, netral, dan akuntabel, (2) Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel, (3) Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal. Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Penelitian. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI terdiri dari 5 bidang, yaitu Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Hukum, dan Bidang Hubungan Internasional.

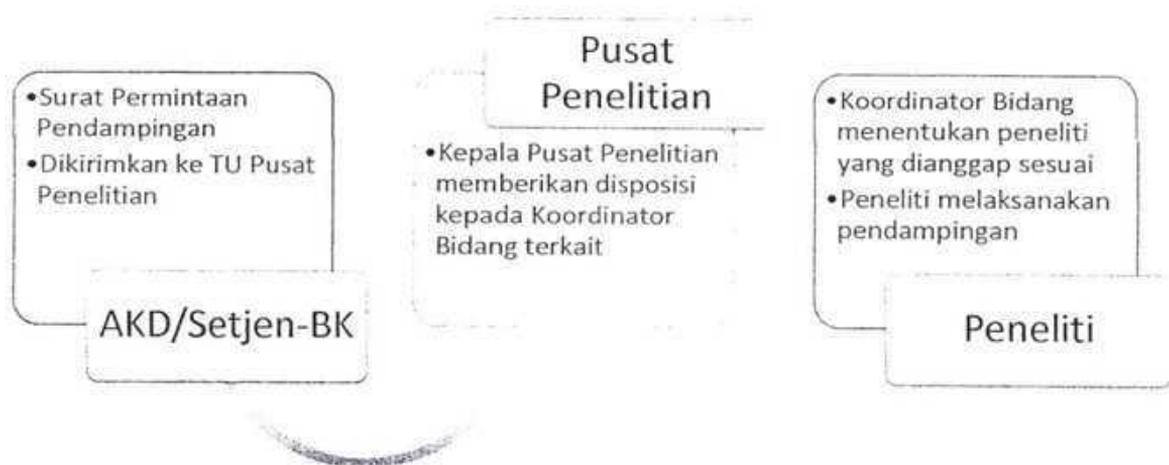
Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel. Dukungan dalam hal ini terutama diberikan kepada

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI yang terdiri dari:

- 1 Pimpinan Dpr
- 2 Badan Musyawarah
- 3 Komisi
- 4 Badan Legislasi
- 5 Badan Anggaran
- 6 Badan Urusan Rumah Tangga
- 7 Badan Kerjasama Antar PARLEMEN
- 8 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- 9 Mahkamah Kehormatan Dewan
- 10 Panitia Khusus

Dukungan yang diberikan oleh para peneliti di Pusat Penelitian kepada AKD adalah: dukungan Fungsi Legislasi dan Pengawasan. Fungsi Legislasi dalam hal ini adalah melakukan pengkajian dan turut serta dalam proses Penyusunan, Pembahasan, dan juga Kunjungan Kerja dalam rangka Rencana Undang-Undang. Sedangkan fungsi pengawasan adalah turut serta dalam kegiatan kunjungan kerja, baik yang bersifat spesifik maupun umum, yang dilakukan oleh AKD.

Proses penugasan pendampingan AKD serta Setjen dan BK DPR RI adalah seperti pada bagan di bawah ini:



Berdasarkan testimoni dari beberapa senior di lingkungan Pusat Penelitian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP) didapatkan suatu kondisi dimana masih terjadi distribusi penugasan pendampingan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang tidak merata di antara peneliti. Hal tersebut diakibatkan karena adanya permintaan dari AKD kepada peneliti berdasarkan penunjukan langsung atau berdasarkan kemauan AKD yang bersangkutan.

Permintaan AKD kepada peneliti dalam rangka memberikan mendukung pendampingan baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Hal ini menyebabkan adanya peneliti yang kelebihan permintaan (overload) sementara yang lain hanya sedikit atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam penugasan pendampingan kepada AKD. Dampaknya, peneliti yang terlibat di banyak penugasan seringkali kurang memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi sasaran kerja utamanya dan memenuhi angka kredit sebagai bagian dari kewajiban seorang peneliti (**Akuntabilitas**). Kondisi tersebut dikarenakan belum adanya mekanisme penugasan peneliti di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian BK DPR RI untuk pendampingan kepada AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai peneliti.

Jika isu tersebut tidak diselesaikan maka akan sulit bagi peneliti di Bidang EKP Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI untuk memberikan pelayanan kepada AKD secara efektif dan efisien. Hal tersebut terkait dengan bagaimana peneliti memberikan komitmen mutu dalam pelayanan publik kepada AKD. Kondisi tersebut juga mengakibatkan sulitnya mengatur waktu untuk mengerjakan tugas utama yang menghasilkan angka kredit sebagai kewajiban bagi seorang peneliti yang mendapatkan beban penugasan yang terlalu banyak (**Komitmen Mutu, Manajemen ASN**)

Kondisi yang ada akan mempengaruhi akuntabilitas peneliti EKP dalam memenuhi sasaran kinerja utamanya sebagai ASN (**Manajemen ASN, Akuntabilitas**). Pelayanan kepada AKD juga dapat terganggu ketika seorang peneliti terlibat dalam banyak penugasan sehingga pelayanan menjadi tidak maksimal dan mengurangi kepuasan AKD sebagai publik penerima layanan (**Pelayanan publik, Komitmen Mutu**). Dampak lebih luasnya adalah terganggunya hubungan kerjasama, sinergi, dan koordinasi antara Pusat Penelitian dengan AKD sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, baik Pusat Penelitian maupun Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI secara umum (**Manajemen ASN, Pelayanan Publik, Whole of Government**).

B. NILAI-NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) No.03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pasal III yang menyatakan bahwa nilai-nilai dasar PNS Setjen dan BK DPR RI adalah: Religius, Akuntabilitas, Profesional, dan Integritas (RAPI).

Sikap Religius diwujudkan dalam melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap Akuntabilitas diwujudkan melalui tindakan: (1) bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan, (3) memberikan teladan bagi lingkungan kerja, dan (4) memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan peruntukannya.

Sikap Profesional diwujudkan dalam bentuk: (1) mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Setjen dan BK DPR RI, (2) bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsif, dalam rangka meningkatkan kinerja Setjen dan BK DPR RI, (3) berorientasi pada peningkatan kualitas kerja, dan/atau (4) memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan.

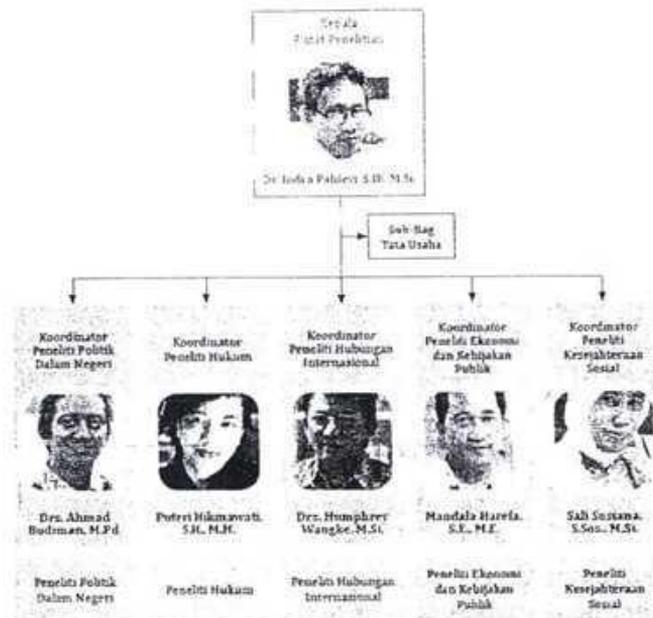
Sikap Integritas diwujudkan melalui tindakan: (1) jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS, (2) menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Setjen dan BK DPR RI, (3) menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (5) tidak merugikan orang lain dan negara, (6) menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan (7) menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

Nilai-nilai organisasi tersebut harus diterapkan dalam melaksanakan tugas, khususnya sebagai peneliti di Pusat Penelitian BK DPR RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI No.6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No.2 Tahun 2016, memiliki tugas melakukan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian;
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian;

3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Penelitian;
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian;
6. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian;
7. Pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian;
8. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian;
9. Pelaksanaan tata usaha Pusat Penelitian;
10. Penyusunan laporan kerja Pusat Penelitian;
11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian

Adapun struktur organisasi dari Pusat Penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penelitian BK DPR RI

Peserta Diklat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang akan menduduki jabatan fungsional peneliti. Tugas pokok dan fungsi dari seorang Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI tergantung dari tingkat jabatannya dan dapat dilihat dari Sasaran Kerja Pegawai. Peneliti Pertama memiliki Sasaran Kerja Pegawai secara umum yaitu:

- 1 Melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokoknya
- 2 Melakukan penelitian mengenai perkembangan issue-issue kedewanan Undang-Undang (legislasi), Anggaran dan Pengawasan
- 3 Melakukan analisis dan kajian-kajian mengenai kedewanan (Undang-Undang (legislasi), Anggaran dan Pengawasan)

- 4 Melakukan Analisis dan kajian pada alat kelengkapan Dewan
- 5 Memberikan hasil analisis dan kajian-kajian kepada anggota dewan sesuai dengan bidang tugasnya
- 6 Melakukan analisis dan kajian sesuai perintah atasan
- 7 Melaporkan hasil kerja kepada atasan secara berkala
- 8 Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
- 9 Membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan kebutuhan dewan dalam rangka proses pembahasan UU, Anggaran dan Pengawasan
- 10 Membuat Karya tulis ilmiah dalam Jurnal
- 11 Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan
- 12 Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan

C. TUJUAN

Tujuan dari diangkatnya isu terkait belum meratanya distribusi penugasan pendampingan AKD dan Sekretariat dan Badan Keahlian (Setjen-BK) DPR RI oleh Peneliti di Pusat Penelitian adalah untuk melihat lebih jauh kondisi yang ada di Pusat Penelitian Bidang EKP dan apa yang menyebabkan ketidakmerataan tersebut terjadi. Berdasarkan hasil tersebut, maka penulis akan memberikan alternatif saran dan solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan membuat sistem monitoring dan distribusi yang diharapkan dapat membantu Koordinator Bidang untuk menentukan peneliti yang akan ditugaskan. Dampak yang diharapkan dari sistem tersebut adalah meratanya distribusi penugasan pendampingan AKD dan Setjen-BK DPR RI sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal, baik bagi peneliti maupun bagi anggota dewan, yaitu:

1. Setiap peneliti mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam pendampingan, baik di AKD maupun di Setjen-BK DPR RI sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Peneliti (**Akuntabilitas, Manajemen ASN**).
2. Pusat Penelitian dapat memberikan pelayanan pendampingan secara maksimal kepada AKD dan Setjen-BK DPR RI (**Manajemen Mutu, Pelayanan Publik, Whole of Government**).

BAGIAN II DESKRIPSI ISU

A. PENJELASAN PERUBAHAN

Secara umum, tidak ada perubahan kegiatan dalam penyelesaian isu. Namun terdapat beberapa modifikasi pada tahapan kegiatan. Kegiatan pertama adalah Diskusi dengan senior (*problem listing*) yang terdiri dari 6 tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 minggu tanpa ada perubahan tahapan kegiatan. Kegiatan berikutnya adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Koordinator Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP) yang terdiri dari 6 tahapan kegiatan dan tidak mengalami perubahan. Pelaksanaan FGD dilakukan dalam 1 hari.

Kegiatan ketiga adalah pelaksanaan wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian. Terdapat perubahan tahapan pada kegiatan ini. Pada rancangan aktualisasi dituliskan tahapan pembuatan dan pengiriman surat permohonan wawancara kepada Kepala Pusat Penelitian. Pada pelaksanaannya permohonan wawancara hanya dilakukan secara lisan sesuai arahan Mentor. Hal tersebut dilakukan untuk efisiensi waktu dan pelaksanaan kegiatan mengingat jadwal Kepala Pusat Penelitian cukup padat pada saat kegiatan aktualisasi berlangsung.

Kegiatan keempat adalah wawancara dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI). Tahapan yang diajukan dalam rancangan aktualisasi adalah 7 tahapan kegiatan dengan 1 kali proses wawancara. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan penyesuaian yaitu proses wawancara dilakukan 2 kali. Hal tersebut dikarenakan perlunya memastikan kemungkinan-kemungkinan dan *variable* yang akan digunakan dalam Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD. Tahap wawancara pertama adalah penyampaian maksud dan tujuan pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD, khususnya di kalangan peneliti bidang EKP. Wawancara awal adalah melihat kemungkinan pembuatan sistem tersebut dalam kurun waktu yang tersedia dan variabel apa saja yang akan dimasukkan dalam sistem. Hasil dari wawancara pertama kemudian dilaporkan dan didiskusikan dengan Mentor untuk mendapatkan tabel informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan monitoring penugasan pendampingan AKD. Hasil review dari Mentor didiskusikan kembali dengan BDTI untuk dicocokkan dengan database pegawai yang ada pada Portal DPR RI.

Kegiatan kelima adalah pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD. Tahapan kegiatan yang diajukan adalah sebanyak 7 kegiatan namun perlu penambahan tahapan kegiatan menjadi 10 tahapan. Perubahan yang terjadi adalah:

1. Diskusi lanjutan dengan BDTI. Selama proses pembuatan sistem, diskusi terus dilaksanakan dengan BDTI untuk memastikan variabel yang digunakan sudah sesuai. Diskusi juga dilakukan selama proses integrasi sistem database pegawai dengan website Pusat Penelitian dan juga proses finalisasi sistem monitoring dan distribusi.
2. Permohonan izin akses: Izin akses dibutuhkan untuk mengisi dan *update* database peneliti di Portal DPR RI. Izin akses akan memberikan penulis *user admin* selama kurun waktu tertentu.
3. Pengisian data dari Portal Database Pegawai yang akan diintegrasikan dengan Website Pusat Penelitian. Hal tersebut dilakukan karena pada Tabel Data sebelumnya masih ada variabel yang belum digunakan. Pengisian data dilakukan dengan menanyakan kembali kepada para peneliti bidang EKP terkait variabel-variabel yang belum terisi untuk melengkapi database.

B. CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Secara umum, pelaksanaan aktualisasi berjalan sesuai dengan jadwal. Seluruh kegiatan berhasil dilaksanakan meskipun terdapat beberapa perubahan pada tahapan kegiatan. Produk akhir dari aktualisasi adalah Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI yang terdiri dari:

1. Data umum tentang Peneliti di EKP yang berisi tentang riwayat penelitian dan penugasan pendampingan AKD dan Sekretariat Jenderal- Badan Keahlian DPR RI serta pelaksanaan penelitian dan penugasan pendampingan pada tahun anggaran berjalan (Tabel 4).
2. Data rekapitulasi penugasan pendampingan pada tahun anggaran berjalan (Tabel 5). Data pada Tabel inilah yang digunakan sebagai sarana monitoring distribusi penugasan pendampingan di Bidang EKP. Pada data tersebut terdapat rekapitulasi penugasan pendampingan yang dilakukan oleh masing-masing peneliti dengan memperhatikan beban kerja dan durasi waktu pelaksanaan. Kemudian dibuat kategorisasi dimana jika seorang peneliti sudah menerima penugasan pendampingan dengan jumlah tertentu maka peneliti tersebut dianggap tidak bisa lagi menerima penugasan dan harus didistribusikan kepada peneliti lainnya.

3. Sistem informasi peneliti yang merupakan integrasi antara Portal Pegawai DPR RI (<https://portal.dpr.go.id>) dengan website resmi Pusat Penelitian DPR RI (<https://puslit.dpr.go.id>). Melalui sistem tersebut maka dapat dilihat data peneliti beserta riwayat penelitian, pendampingan, dan produk penelitian yang sudah dihasilkan. Sistem tersebut dapat diakses secara umum melalui website Pusat Penelitian (Lihat Lampiran Gambar 1-6). Sistem tersebut juga memungkinkan pihak terkait (Kepala Pusat Penelitian dan Koordinator Bidang) untuk memantau distribusi tugas pendampingan di Bidang EKP untuk masing-masing peneliti melalui integrasi Tabel 5 pada website Portal DPR RI.

C. ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK

Keseluruhan sistem yang sudah dibuat tersebut memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kemudahan memantau distribusi penugasan pendampingan di tim bidang EKP pada tahun anggaran berjalan, khususnya bagi Kepala Pusat Penelitian dan Koordinator Bidang. Keputusan pemilihan peneliti bisa secara cepat diberikan untuk memenuhi permintaan AKD dan Setjen-BK DPR RI (**Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Manajemen ASN**).
2. Memberikan informasi secara cepat terkait kriteria yang dibutuhkan ketika akan memilih peneliti untuk melakukan pendampingan. Koordinator Bidang akan dapat terbantu untuk menugaskan peneliti dengan kemampuan dan pengalaman yang paling sesuai sehingga diharapkan memberikan hasil maksimal bagi AKD, Setjen-BK DPR RI. (**Komitmen Mutu, Pelayanan Publik, Whole of Government**).
3. Sistem akan membantu pemerataan distribusi penugasan di kalangan peneliti Bidang EKP. Peneliti diharapkan akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam melakukan pendampingan, khususnya pendampingan legislasi kepada AKD (**Pelayanan Publik, Whole of Government**). Peneliti yang sebelumnya sudah mendapatkan cukup jumlah tugas pendampingan akan dialihkan bebannya, sehingga diharapkan peneliti tersebut tidak terhambat dalam melaksanakan tugas utamanya yang tercantum dalam SKP untuk memenuhi angka kredit. (**Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Manajemen ASN**).
4. Data para peneliti yang terdapat di website Pusat Penelitian memberikan akses kepada masyarakat umum mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Data tersebut akan memudahkan pencarian informasi terkait hasil-hasil penelitian dan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh masing-masing peneliti. (**Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Pelayanan Publik**)

D. TANTANGAN/ HAMBATAN

Tantangan yang dihadapi selama melakukan proses aktualisasi ini salah satunya adalah sulitnya meminta waktu para peneliti untuk dapat melakukan wawancara dan melengkapi database. Hal tersebut dikarenakan banyak para peneliti yang melakukan kegiatan penelitian di luar kota, baik penelitian individu maupun kelompok. Kondisi tersebut diatasi dengan cara pengisian database tidak secara serentak atau pada hari yang sama. Pengisian database pada akhirnya dilakukan satu per satu pada waktu yang berbeda tergantung pada kesiapan waktu dan kesediaan peneliti.

Tantangan lainnya adalah membuat sistem monitoring dan distribusi dalam waktu singkat dengan menggunakan sumber daya yang ada. Hal tersebut diatasi dengan berbagai cara, yaitu:

1. Berkonsultasi dengan BDTI untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam membuat sistem yang dimaksud.
2. Menggunakan database yang sudah ada sehingga sistem dapat dibuat lebih cepat.
3. Mengintegrasikan semua online *platform* yang sudah tersedia untuk efektivitas pembuatan sistem.

BAB III

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Diskusi dengan senior di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (<i>Problem listing</i>)					CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI																
	a) Membuat pedoman wawancara/diskusi																					
	b) Mendiskusikan pedoman wawancara dengan Mentor																					
	c) Menghubungi para senior untuk memohon waktu wawancara																					
	d) Melakukan wawancara dan diskusi mendalam dengan para senior																					
	e) Membuat hasil laporan diskusi dan menyerahkannya kepada Mentor																					

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	f) Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach																				
2.	FGD dengan Koordinator Bidang																				
	a) Konsultasi dengan Mentor																				
	b) Membuat undangan tertulis kepada Koordinator Bidang																				
	c) Mengirimkan Undangan kepada Koordinator Bidang melalui Tata Usaha																				
	d) FGD dengan koordinator bidang, coach, dan mentor																				
	e) Membuat hasil laporan FGD dan menyerahkan kepada Mentor dan Coach																				
	f) Diskusi hasil laporan dengan Mentor dan Coach																				

CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
3.	Wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian					CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI																
	a) Menyusun pedoman wawancara Kepala Pusat Penelitian																					
	b) Konsultasi dengan Mentor terkait pedoman wawancara untuk Kepala Pusat Penelitian																					
	c) Menghubungi Kepala Pusat Penelitian untuk menyatakan kebutuhan wawancara																					
	d) Pelaksanaan wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian																					
	e) Membuat laporan hasil wawancara dan menyerahkannya kepada Mentor dan Coach																					
	f) Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach																					

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
4.	Wawancara dengan BDTI (Bidang Data dan Teknologi Informasi)					CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI																
	a) Memetakan kebutuhan sistem online untuk distribusi penugasan pendampingan																					
	b) Diskusi dan konsultasi dengan Mentor terkait kebutuhan sistem online distribusi penugasan pendampingan																					
	c) Membuat surat permohonan wawancara kepada BDTI																					
	d) Mengirimkan surat permohonan wawancara dengan BDTI melalui Tata Usaha																					
	e) Pelaksanaan wawancara dengan BDTI																					
	f) Membuat laporan hasil wawancara dan menyerahkan kepada Mentor dan Coach																					
	g) Diskusi hasil wawancara dengan Mentor																					

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
5.	Pembuatan sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan AKD					CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI																
	a) Diskusi dengan BDTI																					
	b) Membuat draft sistem distribusi penugasan pendampingan																					
	c) Pembuatan permohonan Izin Akses Data Portal																					
	d) Pemaparan draft kepada Koordinator Bidang, Coach, dan Mentor																					
	e) Ujicoba dan review Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan																					
	f) Diskusi dan konsultasi dengan Mentor dan Coach terkait finalisasi system																					
	g) Diskusi dengan BDTI																					
	h) Finalisasi sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan																					
	i) Penyerahan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan kepada																					

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Koordinator Bidang EKP																				
	j) Membuat laporan Evaluasi Aktualisasi																				

BAGIAN IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Unit Kerja** : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Identifikasi Isu** : Menurut testimoni peneliti senior di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik terjadi distribusi penugasan yang tidak merata terkait pelaksanaan tugas pendampingan dewan seperti Kunjungan Kerja, Pembahasan Rencana Undang-Undang, dan penugasan lain terkait AKD. Hal tersebut mengakibatkan ada sebagian peneliti mendapatkan tugas penugasan yang terlalu banyak sedangkan peneliti lainnya tidak mendapatkan kesempatan pendampingan. Kondisi tersebut berdampak tidak optimalnya pelayanan kepada AKD. Dampak lebih lanjutnya adalah sebagian peneliti akan kesulitan memenuhi angka kredit karena beban tugas yang terlalu besar sehingga menghambat kenaikan jabatan fungsional peneliti.
- Isu yang Diangkat** : Belum meratanya distribusi penugasan peneliti di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian BK DPR RI untuk pendampingan AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai peneliti.
- Gagasan Pemecahan Isu** :
1. Diskusi dengan senior (*problem listing*)
 2. *Focus Group Discussion* dengan koordinator bidang EKP
 3. Wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian
 4. Diskusi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi
 5. Membuat sistem distribusi penugasan tugas pendampingan (manual/online)

Kegiatan I adalah diskusi dengan peneliti di Bidang EKP yang dilaksanakan pada kurun waktu 24 Mei hingga 4 Juni 2018. Sebelum melaksanakan proses wawancara, penulis terlebih dahulu membuat pedoman wawancara dengan arahan dari Mentor. Pedoman wawancara dibuat untuk menjaga netralitas dan konsistensi pertanyaan (**Akuntabilitas**). **Etika Publik** diterapkan ketika mendiskusikan hasil pedoman wawancara tersebut kepada Mentor sehingga Mentor mengetahui terlebih dahulu dan dapat memberikan arahan dan masukan sebelum pedoman diajukan kepada para peneliti senior. Hasil masukan dan diskusi dengan Mentor kemudian dipersiapkan untuk ditanyakan kepada para senior dengan metode wawancara secara langsung (bertatap muka). Hal tersebut menerapkan prinsip **Etika Publik** karena dengan bertemu langsung akan lebih sopan dalam menanyakan hal-hal yang bagi banyak peneliti sifatnya cukup sensitif (dalam hal ini terkait pendapat pribadi para peneliti tentang apakah pelaksanaan penugasan oleh Koordinator Bidang sudah sesuai dengan harapan mereka).

Permohonan wawancara dilakukan secara sopan dengan memperhatikan **Etika Publik** dan sebisa mungkin tidak mengganggu waktu kerja (**Anti Korupsi**). Proses wawancara dilakukan secara privat dengan durasi 15-20 menit per orang. Lokasi pelaksanaan adalah di ruangan Bidang EKP dengan bantuan sarana perekam suara. Dari jumlah total peneliti EKP sebanyak 26 orang terdapat 6 peneliti yang sedang cuti sehingga wawancara berhasil dilakukan terhadap 18 orang peneliti, tidak termasuk Mentor dan Koordinator Bidang.

Selama pelaksanaan kegiatan I, tidak semua proses wawancara berhasil didokumentasikan karena terdapat beberapa peneliti tidak bersedia diambil gambarnya ataupun saat pelaksanaan wawancara kondisi tidak memungkinkan untuk proses pengambilan foto sehingga penulis tetap menghargai keputusan tersebut (**Etika Publik**). Setelah pelaksanaan kegiatan maka dibuat Laporan Singkat dari kegiatan I dan dilaporkan kepada Mentor (**Akuntabilitas**). Laporan hasil pelaksanaan kegiatan I terdapat pada Lampiran Laporan Singkat Kegiatan I.

Kegiatan II adalah pelaksanaan diskusi terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) antara Koordinator Bidang dengan Mentor yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018. Kegiatan didahului dengan pembuatan undangan kepada Koordinator Bidang EKP. Undangan yang dibuat ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian selaku atasan langsung penulis (**Manajemen ASN**). Undangan tersebut diserahkan kepada Koordinator Bidang dan arsipnya disimpan sebagai bentuk pertanggungjawaban (**Akuntabilitas**). Sama halnya dengan kegiatan sebelumnya, pada kegiatan II ini juga dibuat pedoman wawancara sebagai panduan melakukan FGD dengan Koordinator Bidang serta hasilnya dituangkan dalam Laporan Singkat (**Akuntabilitas**).

Kegiatan II ini dilakukan untuk menginventaris permasalahan terkait penugasan pendampingan dari sisi Koordinator Bidang selaku pihak yang mendistribusikan tugas tersebut. Koordinator Bidang mendapatkan disposisi dari Kepala Pusat Penelitian untuk memberikan nama-nama peneliti yang bisa ditugaskan untuk melakukan pendampingan. Koordinator Bidang menekankan bahwa perlu secara cepat dan tepat menentukan peneliti agar pendampingan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal (**Komitmen Mutu, Pelayanan Publik, Whole of Government**).

Kegiatan III dilaksanakan setelah libur Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 10 Juli 2018. Pelaksanaan kegiatan ketiga adalah melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian untuk menyampaikan hal-hal yang sudah didapatkan dari Kegiatan I dan II sebelumnya. Pelaksanaan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara sesuai yang terdapat pada Lampiran Laporan Singkat Kegiatan III. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua aspek kebutuhan pembuatan sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI. (**Akuntabilitas, Komitmen Mutu**).

Berdasarkan hasil diskusi dengan peneliti dan Koordinator Bidang, maka berhasil dihimpun 4 hal yang melatarbelakangi tidak meratanya penugasan pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI di Bidang EKP, yaitu:

1. Waktu: Durasi waktu untuk menentukan peneliti semenjak diterimanya surat permohonan pendampingan sangat terbatas. Bahkan umumnya waktu penentuan hanya satu hari sehingga menyulitkan Koordinator Bidang ketika tidak tersedia suatu database untuk kesesuaian kepakaran, pengalaman penelitian, dan beban kerja masing-masing peneliti.
2. Kepakaran: Kepakaran yang ada di EKP masih banyak yang terlalu umum. Dari total 26 orang peneliti EKP, 18 Orang memiliki kepakaran Kebijakan Ekonomi. Kepakaran yang terlalu umum tersebut menyebabkan Koordinator Bidang kesulitan untuk menentukan peneliti ketika RUU yang akan dibahas/disusun sifatnya spesifik, seperti tentang Energi Terbarukan, Musik, Minyak Bumi-Gas Alam, dan sebagainya.
3. Standar Prosedur Operasional: Hingga saat ini belum ada standar prosedur operasional dalam menentukan pemilihan peneliti dalam melakukan pendampingan kepada AKD.
4. Sistem Monitoring: Belum adanya sistem monitoring menjadi kesulitan tersendiri ketika ingin memantau pelaksanaan pendampingan dan melihat distribusinya di antara para peneliti bidang EKP.

Solusi yang biasanya dilakukan adalah menugaskan peneliti yang ada di kantor/ ruangan pada saat perintah penugasan tersebut diterima oleh Koordinator Bidang. Selain itu, Koordinator Bidang umumnya melihat riwayat penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti,

dan yang paling penting adalah kesediaan peneliti untuk ditugaskan. Pada umumnya tidak semua peneliti bersedia menerima penugasan karena tidak terinformasikan dengan baik tentang tugas tersebut dan tidak mengetahui distribusi penugasan pada peneliti yang lain.

Berdasarkan keempat isu di atas, kemudian Kepala Pusat Penelitian meminta untuk dibuat tabel yang berisikan variabel-variabel yang digunakan oleh Koordinator Bidang sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan peneliti untuk melakukan pendampingan (Tabel 3), yaitu:

1. Nama dan Jabatan Peneliti.
2. Latar belakang Pendidikan Peneliti: Latar belakang Pendidikan peneliti bisa dilihat pada menu “Riwayat Pendidikan” yang mencantumkan Pendidikan S1 hingga S2/S3 termasuk jurusan yang diambil oleh peneliti. Menggunakan data tersebut maka Koordinator Bidang dapat melihat peneliti yang memiliki latar belakang Pendidikan yang sesuai atau masih terkait dengan topik penugasan.
3. Kepakaran: Kepakaran yang digunakan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Perka LIPI) No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepakaran Peneliti. Kepakaran digunakan untuk melihat bidang keahlian masing-masing peneliti.
4. Penelitian dan Penugasan di Tahun 2017: Variabel tersebut memberikan informasi judul atau topik penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, dan juga riwayat penugasan pendampingan legislasi di tahun 2017. Riwayat penelitian memberikan kemudahan bagi Koordinator Bidang untuk menentukan peneliti yang memiliki pengalaman sesuai dan atau terkait dengan topik dalam tugas pendampingan di tahun berjalan. Riwayat penugasan pendampingan yang digunakan adalah khusus yang bersifat legislasi. Ketika seorang peneliti mendapatkan tugas pendampingan legislasi (penyusunan/pembahasan RUU) yang sifatnya belum selesai dan masih aktif, maka tugas tersebut akan diteruskan ke tahun berikutnya.
5. Penelitian dan Penugasan di Tahun 2018. Data berisi variabel:
 - a. Penelitian: data berisi judul penelitian, baik individu maupun kelompok dilengkapi dengan lokasi penelitian.
 - b. Pendampingan Legislasi: data berisi topik RUU, status aktif/tidak aktif, dan tahun usulan. Data yang termasuk dalam kolom ini termasuk tugas pendampingan RUU dari tahun sebelumnya yang masih aktif (belum selesai dan masih dalam tahap pembahasan atau penyusunan).
 - c. Pendampingan Pengawasan: Yang termasuk dalam penugasan ini adalah kegiatan kunjungan kerja, baik spesifik maupun umum, di luar kunjungan kerja yang terkait

RUU. Data yang dimasukkan adalah judul kegiatan, tanggal dan atau bulan, pemberi tugas, dan lokasi penugasan.

- d. Penugasan di Setjen BK DPR RI: Penugasan di Setjen dan atau BK DPR RI umumnya merupakan kegiatan yang bersifat tahunan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan DPR RI.

Kepala Pusat Penelitian juga meminta agar tabel tersebut bisa diintegrasikan ke dalam website Pusat Penelitian sehingga bisa membantu Kepala Pusat penelitian dalam memantau pelaksanaan penugasan para peneliti, baik tugas pokok maupun pendampingan. Harapan dari dibuatnya tabel tersebut adalah untuk memudahkan proses monitoring pelaksanaan pendampingan (**Akuntabilitas, Manajemen ASN**).

Permintaan Kepala Pusat Penelitian dan hasil tabel tersebut kemudian diteruskan untuk dibahas dengan Bagian Data dan Teknologi Informasi (BDTI) dalam **Kegiatan IV**. Kegiatan ini didahului dengan membuat Surat Permohonan untuk diskusi yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian (**Akuntabilitas, Whole of Government**). Proses diskusi dan wawancara juga dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat atas persetujuan mentor. Adapun hasil dari wawancara dan diskusi terdapat pada Lampiran Laporan Singkat Kegiatan IV.

Proses diskusi pada tahap Kegiatan IV semula direncanakan satu kali. Namun karena proses pembahasan pembuatan sistem tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan maka dilakukan diskusi lanjutan sehingga total pelaksanaan diskusi pada Kegiatan IV menjadi dua kali. Kegiatan IV ini juga menghasilkan tabel baru yang merupakan penyesuaian atas Tabel 3 yang sebelumnya sudah dibuat (Tabel 4). Penyesuaian dilakukan untuk menyederhanakan tabel sehingga lebih mudah untuk diterapkan pada portal database. Hasil diskusi menyimpulkan bahwa memungkinkan untuk dibuat suatu sistem yang mengintegrasikan database para peneliti yang berisi biodata serta riwayat pekerjaan dengan website Pusat Penelitian. Oleh karena itu kegiatan dilanjutkan ke kegiatan V.

Kegiatan V adalah membuat sistem berdasarkan hasil diskusi dengan BDTI dengan menggunakan variabel-variabel yang ada pada tabel 4 tersebut (**Akuntabilitas**). Tahap kegiatan awal didahului dengan melakukan kembali diskusi mendalam dengan BDTI yang juga menyandingkan kembali data pada Tabel Data dengan database peneliti yang ada pada Portal DPR RI untuk memastikan bahwa proses integrasi dapat dilakukan dengan baik (**Komitmen Mutu, Akuntabilitas**). Database yang sudah dipersiapkan oleh BDTI kemudian harus diisi oleh penulis. Namun mengingat penulis bukanlah petugas admin dari Portal DPR-RI untuk itu diperlukan Surat Permohonan Izin Akses terhadap database tersebut guna memastikan tidak

terjadi kesalahan prosedur dalam menggunakan database (**Akuntabilitas, Manajemen ASN, Whole of Government**).

Pengisian database perlu dilakukan kembali karena masih banyak *datafield* pada database yang ternyata belum terisi. Proses tersebut memakan waktu lama dan tidak dapat seluruhnya terisi. Hal tersebut terjadi karena pada saat pelaksanaan banyak peneliti yang sedang dalam penugasan penelitian dan survey sehingga tidak dapat dimintai data dan keterangannya. Namun demikian proses integrasi tetap dapat dilaksanakan sehingga data terkait peneliti dapat diakses secara bebas melalui website Pusat Penelitian. Proses dan hasil kegiatan ini dijelaskan dalam Lampiran Laporan Singkat Kegiatan 5.1

Hasil integrasi kemudian dipaparkan kepada Kepala Pusat Penelitian, Koordinator Bidang EKP, Mentor, *Coach*, dan rekan CPNS Calon Peneliti sebagai bentuk laporan dan permohonan untuk mendapat arahan dan masukan atas sistem tersebut (**Akuntabilitas, Komitmen Mutu**). Berdasarkan hasil pemaparan draft Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan kepada pihak terkait, ternyata masih didapatkan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Terutama adalah masih belum tersedianya suatu rekapitulasi yang dapat berfungsi sebagai *warning system* ketika seorang peneliti sudah terbebani penugasan pendampingan yang lebih banyak dibandingkan peneliti lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Lampiran Laporan Singkat Kegiatan 5.2

Data para peneliti yang terdapat pada Tabel 4 kemudian dibuat rekapitulasinya (Tabel 5). Rekapitulasi memuat ringkasan data terkait tugas pendampingan selama tahun berjalan untuk masing-masing peneliti. Data yang direkapitulasi yaitu:

- a. Jumlah tugas pendampingan legislasi yang masih aktif hingga tahun 2018.
- b. Jumlah tugas pendampingan pengawasan yang dilaksanakan di tahun 2018
- c. Jumlah tugas pendampingan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI selama tahun 2018.
- d. Kolom keterangan yang diisi dengan status “Merah” atau “Hijau”. Status Merah diterapkan jika peneliti sudah menerima 2 tugas pendampingan legislasi, 3 kali tugas pendampingan pengawasan, dan 4 tugas di Setjen dan BK DPR RI. Jika seorang peneliti belum memenuhi kondisi tersebut, maka statusnya adalah Hijau.

Tabel rekapitulasi (Tabel 5) yang sudah dibuat kemudian diajukan kembali kepada BDTI untuk dapat diterapkan pada sistem yang sudah dibuat. Kegiatan diteruskan dengan finalisasi sistem. Sistem yang sudah dibuat kemudian disampaikan kembali kepada Koordinator Bidang dan *Coach* untuk mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian, diharapkan kedepannya sistem tersebut bisa digunakan untuk seluruh peneliti

di Pusat Penelitian (**Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Pelayanan Publik, Whole of Government**).

B. SARAN

a. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan klasikal yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Sekretariat Jenderal DPR-RI sudah berjalan dengan baik. Peserta mendapatkan fasilitas belajar dan mengajar yang sangat memadai. Jadwal yang dibuat cukup padat namun mudah untuk diikuti. Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di masa mendatang adalah: Diseminasi informasi terkait penyelenggaraan pelatihan perlu dilakukan secara lebih komprehensif sehingga tidak terjadi perbedaan informasi baik antara penyelenggara dengan peserta, maupun antar pelaksana/penyelenggara.

b. Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

Terkait isu distribusi dan monitoring penugasan pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI, terdapat beberapa saran yang bisa diberikan bagi Kepala Pusat Penelitian, yaitu:

1. Menunjuk dan mempersiapkan pegawai yang akan ditugaskan sebagai admin untuk memperbaharui database sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI secara berkala.
2. Membuat SOP terkait penugasan pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI.
3. Memperbanyak pelatihan teknis bagi para peneliti dan diskusi dengan para ahli untuk mengatasi kepakaran yang masih terlalu umum.
4. Mempersiapkan perekrutan calon peneliti baru dengan kepakaran yang semakin beragam untuk mengakomodasi kebutuhan pendampingan legislasi dengan topik yang spesifik.

LAMPIRAN

**LEMBAR MONITORING
AKTUALISASI
COACHING DAN MENTORING**

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	: Masyithah Aulia Adhiem
NIP	: 198306032018012002
Unit Kerja	: Pusat Penelitian
Jabatan	: Calon Peneliti Pertama
Isu	: Belum meratanya distribusi penugasan peneliti di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian BK DPR RI untuk pendampingan AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai peneliti

- 1) Kegiatan 1 : Diskusi dengan senior di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (*Problem listing*)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Menyusun Daftar Masalah. Melah di lakukan dengan diskusi bersama peneliti senior dan berdiskusi dengan baik	07/06/18 Presentasi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Daftar masalah yang di peroleh dapat menjadi dasar pijakan bagi tahapan pemecahan isu selanjutnya.	Presentasi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Akuntabilitas dan Etika, publik dan Anti korupsi. Konsisten digantikan dasar dalam Tahapan Kegiatan ini.	Presentasi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Data yg terkumpul akan memberikan catatan awal terhadap visi dan Misi Puslit	Presentasi
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional dan Integritas akan berikan baik, aturan dan melaksanakan penelitian.	Presentasi

2) Kegiatan 2 : FGD dengan Koordinator Bidang EKP

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Kegiatan telah dilaksanakan Dapat dilanjutkan	Diskusi video
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Laporan singkat	Diskusi video
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Keterkaitan dengan akreditasi, komitmen mutu, Pelayanan publik	Diskusi video
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Duk. mendukung visi, Misi organisasi	Diskusi video
Penguatan Nilai Organisasi	Akomodatif, profesional dan integritas	Diskusi video

3) Kegiatan 3: Wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Sesuai jadwal ada penyelesaian masalah penelitian	Diskus video
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Laporan singkat	Diskus video
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	akuntabilitas - komitmen masyarakat Etika publik -	Diskus video
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung nilai di MUI Pusat	Diskus video
Penguatan Nilai Organisasi	akuntabilitas Profesional Integritas Dk	Diskus video

4) Kegiatan 4: Wawancara dengan BDTI

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	terdapat penyesuaian jadwal & tahapan dapat & lanjutan	22 hrs widi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Laporan singkat	Diskusi widi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Keuntungan Komite Muka WAO OK!	Diskusi widi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung UCN dan UCN Puslit	Diskusi widi
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabilitas, Profesional Integritas	Diskusi widi

5) Kegiatan 5: Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	ada penyelesaian tahapan, Relewan sesuai jadwal.	29/09/18 Jusuf rudi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Capura singkat Survei Ok!	rudi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Memerapkan nilai akuntabilitas, K.M Relewan Pasrah, MASN dan WOG	rudi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung visi Misi Puertat	rudi
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabilitas, Profesional Integritas	rudi

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	: Masyithah Aulia Adhiem
NIP	: 198306032018012002
Unit Kerja	: Pusat Penelitian
Jabatan	: Calon Peneliti Pertama
Isu	: Belum meratanya distribusi penugasan peneliti di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian BK DPR RI untuk pendampingan AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai peneliti

- 1) Kegiatan 1 : Diskusi dengan senior di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (*Problem listing*)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Kegiatan telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Telah dibuat laporan singkat atas identifikasi permasalahan berdasarkan hasil wawancara ^{senior} dgn	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Mata pelatihan telah diinternalisasi dalam setiap tahapan proses habitasi (<i>dirtwai</i>)	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Identifikasi & hasil wawancara yang dijadikan sebagai masukan dalam program habitasi sudah sesuai dgn visi, misi dan tusi organisasi	
Penguatan Nilai Organisasi	hasil diskusi dengan senior dapat mampu meningkatkan nilai akuntabilitas dan profesionalisme.	

2) Kegiatan 2 : FGD dengan Koordinator Bidang EKP

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	sesuai dengan jadwal kegiatan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	menghasilkan masukan berupa isu yang seimbang antara permasalahan dan yang upaya penyelesaian jangka pendek	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	FGD menghasilkan informasi yang konstruktif untuk sebagai desain mata pelatihan Akuntabilitas, komitmen Mktv dan pelayanan publik serta etika publik	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Hasil FGD menghasilkan konstruksi berfikir menuju tercapainya visi & misi serta sesuai dgn Tugor & Fungsi	
Penguatan Nilai Organisasi	Hasil FGD diharapkan mampu mempromot nilai Akuntabilitas, profesionalisme dan integritas	

3) Kegiatan 3: Wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Terdapat penyempurnaan tahapan kegiatan berupa permohonan wawancara secara langsung	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Output kegiatan menghasilkan laporan singkat mengenai masalah kepala pusat dan pelaksanaan / melanjutkan pembuatan Sistem Monitoring	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Penekanan dan materi dalam wawancara sesuai dengan substansi mata pelatihan Akuntabilitas, Komitmen mutu, dan Etika publik	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Hasil wawancara mendukung pembuatan Sistem sesuai dengan visi, misi dan Tusi organisasi	
Penguatan Nilai Organisasi	Hasil wawancara telah jelas mengarahkan untuk memperkuat nilai akuntabilitas, profesionalisme dan integritas	

4) Kegiatan 4: Wawancara dengan BDTI

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Tahapan kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan agenda atau rencana kerja	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	hasil diskusi/wawancara di urut dalam laporan singkat dan persertian / membuat materi-jumlah konsep sistem yang terdistribusi	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	diakui bahwa hasil wawancara sangat sesuai dengan mata pelatihan Alkitabiah, komitmen serta WOLC	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	wawancara dapat membantu meningkatkan profesionalisme, etos kerja dan alkitabiah melalui terdistribusi sistem yg dibagikan	
Penguatan Nilai Organisasi	Manfaat dari hasil wawancara dapat mempermudah / memperkuat nilai alkitabiah, profesionalisme & integritas	

5) Kegiatan 5: Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Tahapan kegiatan dan perubahan/penyempurnaan & rencana. Dikawatirkan ada tambahan tahapan pemohonan izin akses data peneliti & tambahan disamping BDTI	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Output berupa laporan singkat dan sistem monitoring & distribusi penugasan pendampingan yg memuat upaya pemecahan masalah yg telah diidentifikasi	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Jelas bahwa pembuatan sistem telah berdampak secara langsung ke mata pelatihan Akuntabilitas, Layanan Masyarakat, dan WOG	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sistem monitoring & distribusi penugasan sangat bermanfaat bagi terdapat Tusi peneliti dan didukung oleh Kapro untuk dapat diadopsi di bidang lain selain EKP	
Penguatan Nilai Organisasi	Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan implementasinya maupun meningkatkan nilai organisasi akuntabilitas, profesionalisme dan integritas	

TABEL

Tabel 2. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi/Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Diskusi dengan senior di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (<i>Problem listing</i>)	<p>a. Membuat pedoman wawancara/diskusi</p> <p>b. Mendiskusikan pedoman wawancara dengan Mentor</p> <p>c. Menghubungi para senior untuk memohon waktu wawancara</p> <p>d. Melakukan wawancara dan diskusi mendalam dengan para senior</p> <p>e. Membuat hasil laporan diskusi dan menyerahkannya kepada Mentor</p> <p>f. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach</p>	Laporan testimoni dari para senior tentang belum meratanya distribusi penugasan pendampingan AKD. Laporan tersebut memberikan gambaran tentang permasalahan belum meratanya distribusi penugasan pendampingan AKD di lingkungan Bidang EKP dari sisi para peneliti sebagai penerima penugasan	Dalam membuat pedoman wawancara/diskusi saya telah mengedepankan nilai-nilai netralitas dan konsisten sehingga tidak terjadi bias. (Akuntabilitas). Permohonan untuk melakukan wawancara telah dilakukan dengan sopan, santun, dan sebisa mungkin tidak mengganggu waktu kerja para senior (Etika Publik, Anti Korupsi). Hasil dari wawancara dituangkan secara jujur untuk kemudian dilaporkan kepada Mentor dan Coach	Dengan mendapatkan testimoni secara menyeluruh dari para peneliti EKP maka telah didapatkan data yang cukup akurat. Hal tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap misi organisasi Pusat Penelitian, yaitu: Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel; dan Memberikan dukungan keahlian	Dengan mendapatkan testimoni secara jujur dari para peneliti terkait pelaksanaan penugasan maka nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI akan diperkuat, yaitu nilai akuntabilitas dan profesional

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi/Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
			(Laporan Singkat Kegiatan 1)	(Etika Publik, Akuntabilitas)	melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel.	
2.	FGD dengan Koordinator Bidang	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi dengan Mentor b. Membuat undangan tertulis kepada Koordinator Bidang c. Mengirimkan Undangan kepada Koordinator Bidang melalui Tata Usaha d. FGD dengan koordinator bidang, coach, dan mentor e. Membuat hasil laporan FGD dan menyerahkan kepada Mentor dan Coach 	Laporan FGD dengan Koordinator Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Hasil laporan memberikan gambaran tentang bagaimana mekanisme memilih peneliti EKP yang akan ditugaskan untuk pendampingan AKD (Laporan Singkat Kegiatan 2)	Pembuatan undangan dilakukan mengikuti kaidah penulisan yang sudah ada, dan disimpan arsipnya secara baik (Akuntabilitas). FGD telah dilakukan dengan mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kepentingan unit/Bidang EKP dalam rangka memberikan pelayanan kepada AKD (Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Pelayanan Publik). Hasil FGD dicatat dan didokumentasikan dengan baik, serta dilaporkan kepada Koordinator Bidang,	<p>Pelaksanaan FGD diharapkan menghasilkan rekomendasi yang cukup akurat dan memberikan kontribusi terhadap misi organisasi Pusat Penelitian, yaitu:</p> <p>Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel; dan Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang</p>	Dengan melaksanakan FGD bersama Koordinator Bidang maka nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI akan diperkuat, yaitu nilai akuntabilitas, profesional, dan integritas.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi/Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		f. Diskusi hasil laporan dengan Mentor dan Coach		Mentor, dan Coach. (Akuntabilitas, Etika Publik)	profesional, netral, dan akuntabel,	
3.	Wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian	<p>a. Menyusun pedoman wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian</p> <p>b. Konsultasi dengan Mentor terkait pedoman wawancara untuk Kepala Pusat Penelitian</p> <p>c. Menghubungi Kepala Pusat Penelitian untuk menyatakan kebutuhan wawancara</p> <p>d. Pelaksanaan wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian</p> <p>e. Membuat laporan hasil wawancara,</p>	<p>Laporan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara Kepala Pusat Penelitian didapatkan gambaran mengenai efektivitas penugasan yang diharapkan dapat dijalankan di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Wawancara telah mendapatkan persetujuan Kepala Pusat Penelitian</p>	<p>Penyusunan pedoman wawancara didasarkan dari hasil testimoni para peneliti senior di bidang EKP dan hasil FGD dengan Koordinator Bidang EKP untuk menyelaraskan tujuan dari pemerataan distribusi penugasan (Akuntabilitas, Komitmen Mutu)</p> <p>Proses wawancara telah dilaksanakan menggunakan etika dan bahasa komunikasi yang baik dan sopan. (Etika Publik). Hasil wawancara dicatat dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Pusat</p>	<p>Pelaksanaan wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi yang cukup akurat dan memberikan kontribusi terhadap misi organisasi Pusat Penelitian, yaitu:</p> <p>Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel; dan Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang</p>	<p>Dengan melaksanakan wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian maka nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI akan diperkuat, yaitu nilai akuntabilitas, profesional, dan integritas.</p>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi/Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		menyerahkannya kepada Mentor dan Coach f. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach	(Laporan Singkat Kegiatan 3)	Penelitian, Mentor, dan Coach (Akuntabilitas, Etika Publik)	profesional, netral, dan akuntabel.	
4.	Wawancara dengan BDTI (Bidang Data dan Teknologi Informasi)	a. Memetakan kebutuhan sistem online untuk distribusi penugasan pendampingan b. Diskusi dan konsultasi dengan Mentor terkait kebutuhan sistem online distribusi penugasan pendampingan c. Membuat surat permohonan wawancara kepada BDTI d. Mengirimkan surat permohonan wawancara dengan BDTI melalui Tata Usaha	Laporan hasil wawancara dengan BDTI untuk menentukan menggunakan sistem monitoring online. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring dan distribusi dapat dibuat online untuk kemudahan akses (Laporan Singkat Kegiatan 4)	Pemetaan kebutuhan sistem distribusi penugasan dilakukan berdasarkan hasil testimoni para senior peneliti di bidang EKP, hasil FGD dengan Koordinator Bidang EKP, dan hasil wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian untuk memastikan sistem yang dirancang memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah terpetakan (Akuntabilitas, Komitmen Mutu) . Sistem dinyatakan bisa dibuat secara online sehingga dilakukan	Wawancara dengan BDTI diharapkan menghasilkan rekomendasi yang cukup akurat dan memberikan kontribusi terhadap misi organisasi Pusat Penelitian, yaitu: Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel; dan Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang	Dengan melaksanakan Wawancara dengan BDTI maka nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI akan diperkuat, yaitu nilai akuntabilitas, profesional, dan integritas.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi/Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pelaksanaan wawancara dengan BDTI f. Membuat laporan hasil wawancara dan menyerahkan kepada Mentor dan Coach g. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor 		kerjasama antara Pusat Penelitian dengan BDTI untuk memprogram dan menjalankan sistem tersebut (Whole of Government).	profesional, netral, dan akuntabel.	
5.	Pembuatan sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan AKD	<ul style="list-style-type: none"> a. Diskusi dengan BDTI b. Membuat draft sistem distribusi penugasan pendampingan c. Membuat Surat Permohonan Izin Akses d. Pengisian Database e. Pemaparan draft kepada Koordinator Bidang, Coach, dan Mentor (ujicoba dan review) 	Sistem distribusi penugasan pendampingan online yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada AKD dan juga memudahkan para koordinator bidang untuk menentukan peneliti yang	Berdasarkan hasil testimoni para peneliti senior di bidang EKP, FGD dengan Koordinator Bidang, wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian, dan wawancara dengan BDTI maka telah dirancang sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan (Akuntabilitas). Sistem yang dibuat	Pembuatan Sistem Monitoring diharapkan menghasilkan rekomendasi yang cukup akurat dan memberikan kontribusi terhadap misi organisasi Pusat Penelitian, yaitu: Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral,	Dengan pembuatan sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan anggota dewan maka nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI akan diperkuat, yaitu nilai akuntabilitas, profesional, dan integritas.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi/Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		f. Diskusi dan konsultasi dengan Mentor dan Coach terkait finalisasi sistem g. Diskusi dengan BDTI h. Finalisasi sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan i. Penyerahan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan kepada Koordinator Bidang EKP j. Membuat laporan Evaluasi Aktualisasi	melakukan pendampingan.	memperhatikan faktor efektivitas dan efisiensi dalam pemerataan penugasan pendampingan AKD sehingga coordinator bidang dapat menentukan peneliti yang melakukan pendampingan dengan cepat dan tepat (Komitmen Mutu, Pelayanan Publik, Manajemen ASN, dan Whole of Government). Selain itu, dengan terdistribusinya penugasan maka diharapkan semua peneliti di Bidang EKP memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan tugas (Anti Korupsi, Akuntabilitas) dalam	dan akuntabel; dan Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel; dan Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi/Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
				rangka pemenuhan angka kredit peneliti EKP. (Manajemen ASN, Komitmen Mutu)		

NO	NAMA	JABATAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	KEPAKARAN		PENELITIAN DAN PENUGASAN TA 2017			PENELITIAN DAN PENUGASAN TA 2018								SEKRETARIAT JENDERAL/ BK DPR RI		
						PENELITIAN	PENDAMPINGAN		PENELITIAN		PENDAMPINGAN AKD								
							Pembahasan/ Perancangan RUU	Tahun Ujulan			JUDUL	LOKASI	LEGISLASI		PENGAWASAN/DIPLOMASI PARLEMEN				
				BIDANG	BID. PENELITIAN/ PEMINATAN	Peran lembaga pembiayaan di Indonesia (Kelompok)			RUU Ekonomi Kreatif					Topik/Judul	Aktif/Tdk Aktif	Tahun Ujulan		Kegiatan	Tanggal/ Bulan
7	Ari Muliarta Ginting, S.E., M.S.E.	Peneliti Madya		Kebijakan Ekonomi		Peran lembaga pembiayaan di Indonesia (Kelompok)	RUU Ekonomi Kreatif		Kebijakan Investasi dan Perdagangan di Era Otonomi Daerah (Kelompok)		RUU Ekonomi Kreatif								Tim Survey, Tim Website
							RUU Keuangan Negara (sejak 2012)				RUU Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan								
							RUU Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan												
8	Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba	Peneliti Madya		Manajemen Industri			Tim Pansus Pelindo		Disruptive Technology Kebijakan Pengembangan Ekonomi (Kelompok)		RUU Lalulintas dan Angkutan Jalan								Tim Survey, Redaksi Insing
							Tim Otonomi Khusus Papua												
9	Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.	Peneliti Madya		Kebijakan Ekonomi	Manajemen SOA, Ketenagakerjaan	Peran lembaga pembiayaan di Indonesia (Kelompok)	RUU Tabungan Perumahan Rakyat (2015)		Strategi Kebijakan Investasi pada Era Otonomi Daerah dalam Mendukung Sektor Perdagangan (Kelompok)	Prov. Jawa Barat, Sulawesi Selatan		Tkui		Tim Kunjungan Kerja Komisi	VI	Jateng Batam		Tim Redaksi Jurnal Kajian	
						Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Konsep Minapolitan (individu)			Strategi Meningkatkan Daya Saing Industri Retail Indonesia (individu)	Kota Surabaya, Kota Yogyakarta								Tim Survey Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Setjen dan BK DPR RI	
																		Tim Survey Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2014-2017	
10	Nidya Waras Syekti, S.E., M.M.	Peneliti Muda		Kebijakan Ekonomi	Kebijakan SDM, Keuangan Syariah				Kebijakan Strategi Pengembangan Ekonomi Kelautan (Kelompok)									Tim Survey, Redaksi JIEP	
11	Dewi Wuryandani, S.T., M.M.	Peneliti Muda		Kebijakan Ekonomi					Disruptive Technology Kebijakan Pengembangan Ekonomi (Kelompok)		RUU Kewirausahaan Nasional	Hamonisas						Redaksi JIEP	

NO	NAMA	JABATAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	KEPAKARAN		PENELITIAN DAN PENUGASAN TA 2017						PENELITIAN DAN PENUGASAN TA 2018						SEKRETARIAT JENDERAL / BK DPR RI	
						PENELITIAN	PENDAMPINGAN		PENELITIAN		PENDAMPINGAN AKD								
							Pembahasan/ Perancangan RUU	Tahun Usulan			JUDUL	LOKASI	LEGISLASI		PENGAWASAN/DIPLOMASI PARLEMEN				
													Topik/Judul	Aktif/Tdk Aktif	Tahun Usulan	Kegiatan	Tanggal/ Bulan		Pemberi Tugas
12	Yuni Sudarwati, S. Ip., M.Si.	Peneliti Muda		Manajemen Industri		Optimalisasi pengelolaan SDA untuk kesejahteraan dan pembangunan daerah (kelompok)				(Cut)									
13	Arisy Tri Mauleny, S.Si., M.E.	Peneliti Muda		Kebijakan Ekonomi						(Cut)									
14	Eka Budiyanti, S.Si., M.Si.	Peneliti Muda		Kebijakan Ekonomi		Peran paket kebijakan ekonomi terhadap peningkatan investasi pada UMKM berorientasi ekspor. Studi di Prov.Jatim dan Kepri (kelompok)	RUU Perdagangan Komoditas Berjangka			Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi (Kelompok)	RUU LLAJ	aktif	2018						Tim Survey Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2017
							RUU Peternakan												Tim Redaksi JEKP
							RUU Merk												
							RUU LLAJ												
15	Dewi Restu Mangeswari, S.E., M.Si.	Peneliti Muda		Kebijakan Ekonomi	Ekonomi, akuntansi, perbankan, Kebijakan Publik	Kebijakan dan Strategi Pengembangan, Kewirausahaan dalam Menghadapi Persaingan Bebas	RUU ttg Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Penyusunan, Komisi VI)	masih aktif	Teknologi Disruptif: Tantangan dan Peluang dalam Mengembangkan Kewirausahaan	Kota Bandung, Jawa Barat dan Kota Denpasar	Penyusunan dan Pembahasan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS)	aktif		Tim Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Kenaikan Harga Beras (Komisi VI) Januari	Januari	VI			Tim Survey Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2017
							KUNKER dalam rangka RUU LPMPUTS ke SULSEL Okt 2017				Penyusunan dan Pembahasan RUU tentang Kewirausahaan Nasional	aktif							Tim Redaksi Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik
							Tim Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Ketersediaan Sembako Menjelang Ramadhan di Prov. Aceh (Komisi VI, April)												Tim Website Pusat Penelitian
16	Izzaty, S.T., M.E.	Peneliti Muda		Kebijakan Ekonomi						(Cut)									
17	Achmad Wirabrata, S.T., M.M	Peneliti Muda		Kebijakan Ekonomi		Optimalisasi pengelolaan SDA untuk kesejahteraan dan pembangunan daerah (kelompok)	RUU Jalan (sejak 2010)			Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi (Kelompok)	RUU Jalan (sejak 2010)	aktif	2010	Kunker Rotes		Komisi VI		Papua Barat (30) 1-3 agustus 2018	Tim Survey Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2017

NO	NAMA	JABATAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	KEPAKARAN		PENELITIAN DAN PENUGASAN TA 2017			PENELITIAN DAN PENUGASAN TA 2018							SEKRETARIAT JENDERAL/ BK DPR RI		
						PENELITIAN	PENDAMPINGAN		PENELITIAN		PENDAMPINGAN AKD							
							Pembahasan/ Perancangan RUU	Tahun Usulan			JUDUL	LOKASI	LEGISLASI		PENGAWASAN/DIPLOMASI PARLEMEN			
				BIDANG	BID. PENELITIAN/ PEMINATAN	Topik/Judul			Aktif/Tdk Aktif	Tahun Usulan			Kegiatan	Tanggal/ Bulan	Pemberi Tugas		Lokasi	
26	Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.	Peneliti Muda		Akuntansi		Peran paket kebijakan ekonomi terhadap peningkatan investasi pada UMKM berorientasi ekspor. Studi di Prov. Jatim dan Kepri (kelompok)			Kebijakan Investasi dan Perdagangan di Era Otonomi Daerah (Kelompok)									Tim Survey Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2017
																		Tim Naskah Pidato

Formulir 9 : Pernilaian Deskriptif
Pelaksanaan Aktualisasi dari
Pembimbing (*Coach/ Mentor*)

**PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA
DALAM MELAKSANAKAN AKTUALISASI**

Nama Peserta : **Masyithah Aulia Adhiem, M.E.**
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Jabatan : Calon Peneliti Pertama
Tempat Aktualisasi : Pusat Penelitian
(unit tempat melaksanakan aktualisasi)

Saya menilai peserta Pelatihan Calon PNS Golongan III tersebut;

Sangat Mampu/ Mampu/ Kurang Mampu/ Tidak Mampu*

Melaksanakan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Jakarta, 27 September 2018

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A

*Coret yang tidak perlu

**TABEL 5. MONITORING TUGAS PENDAMPINGAN
 BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
 TAHUN ANGGARAN BERJALAN 2018**

NO	NAMA	LEGISLASI	PENGAWASAN	SETJEN/BK DPR RI	KETERANGAN
1	Mandala Harefa, S.E., M.Si.	0		2	HIJAU
2	Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.	2	3	2	MERAH
3	Hariyadi, S.IP., MPP	2	0	1	MERAH
4	Suhartono, S.IP., M.P.P.				CUTI
5	Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.	3	0	4	MERAH
6	Rasbin, S.Tp., M.S.E.	1	1	1	HIJAU
7	Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.	2	0	2	MERAH
8	Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba	1	2	1	HIJAU
9	Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.	2	1	3	MERAH
10	Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.	0	0	2	HIJAU
11	Dewi Wuryandani, S.T., M.M.	1	0	3	HIJAU
12	Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.				CUTI
13	Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.				CUTI
14	Eka Budiyantri, S.Si., M.S.E.	1	0	2	HIJAU
15	Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.	2	1	3	MERAH
16	Izzaty, S.T., M.E.				HIJAU
17	Achmad Wirabrata, S.T., M.M	2	1	3	MERAH
18	Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.	0	1	2	HIJAU
19	Rafika Sari, S.E., M.S.E.	2	0	0	MERAH
20	Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.	0	0	1	HIJAU
21	Lukman Adam, S.Pi., M.Si.				HIJAU
22	Hilma Meilani, S.T., MBA.	1	0	1	HIJAU
23	Lisnawati, S.Si., M.S.E.	2	2	1	MERAH
24	T. Ade Surya, S.T., M.M.	0	0	2	HIJAU
25	Iwan Hermawan, S.P., M.Si.				CUTI
26	Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.	0	0	2	HIJAU

GAMBAR

SISTEM MONITORING DAN DISTRIBUSI PENUGASAN PENDAMPINGAN AKD-SETJEN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Pusat Penelitian Log Out

Pengguna: Masyarakat
Aulia Adhlem
Peran: super

Daftar Laporan Kustom

Page: 1 of 1 1 - 10 20 30

No.	Judul	SQL	
1	Aktivitas Per Pegawai EKP	SELECT a.id, a.nip, a.nama, a.d_jrn, SUM(CASE WHEN b.tipe = 1 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total, SUM(CASE WHEN b.tipe = 2 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total2, SUM(CASE WHEN b.tipe = 3 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total3, SUM(CASE WHEN b.tipe = 4 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total4 FROM dls_aktivitas LEFT JOIN dls_pegawai ON a.id_pegawai = dls_pegawai.id_pegawai LEFT JOIN dls_tahun ON a.id_tahun = dls_tahun.id_tahun WHERE a.status = 1 AND a.tahun = 2018 ORDER BY a.id	EDIT DELETE VIEW EXPORT
2	Aktivitas Per Pegawai EKP	SELECT a.id, a.nip, a.nama, a.d_jrn, SUM(CASE WHEN b.tipe = 1 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total, SUM(CASE WHEN b.tipe = 2 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total2, SUM(CASE WHEN b.tipe = 3 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total3, SUM(CASE WHEN b.tipe = 4 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total4 FROM dls_aktivitas LEFT JOIN dls_pegawai ON a.id_pegawai = dls_pegawai.id_pegawai LEFT JOIN dls_tahun ON a.id_tahun = dls_tahun.id_tahun WHERE a.status = 1 AND a.tahun = 2018 ORDER BY a.id	EDIT DELETE VIEW EXPORT
3	Aktivitas Per Tim	SELECT a.id, a.nip, a.nama, a.d_jrn, SUM(CASE WHEN b.tipe = 1 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total, SUM(CASE WHEN b.tipe = 2 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total2, SUM(CASE WHEN b.tipe = 3 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total3, SUM(CASE WHEN b.tipe = 4 THEN b.jumlah_kegiatan ELSE 0 END) AS total4 FROM dls_aktivitas LEFT JOIN dls_pegawai ON a.id_pegawai = dls_pegawai.id_pegawai LEFT JOIN dls_tahun ON a.id_tahun = dls_tahun.id_tahun WHERE a.status = 1 AND a.tahun = 2018 ORDER BY a.id	EDIT DELETE VIEW EXPORT

Gambar 5. Rekapitulasi Penugasan Pendampingan pada Portal DPR RI

Pusat Penelitian Log Out

Pengguna: Masyarakat
Aulia Adhlem
Peran: super

LAPORAN KUSTOM SIDILA Aktivitas Per Pegawai EKP

Page: 1 of 1 1 - 10 20 30

No.	Id	nip	nama	id_tim	Aktivitas	Legislasi	Pengawasan	Total	
1	197	19726511100901003	Ahmad Sanjaya, S.E., M.A.	4	8	2	1	7	EDIT DELETE VIEW EXPORT
2	445	14774757400000000	Ahmad Wulandari, S.T., M.M.	3	7	0	0	6	D
3	204	10438802000000000	Ahmad Mulyana, S.E., M.S.E.	4	2	0	0	2	EDIT DELETE VIEW EXPORT
4	358	10710306200002000	Ahmad Tri Mulyana, S.S., M.E.	4	0	0	0	0	EDIT DELETE VIEW EXPORT
5	101	10420574200000000	Devina Mulyana, S.E., M.S.	4	3	1	1	3	D
6	210	10739611200000000	Devina Wulandari, S.T., M.M.	1	0	0	0	0	D
7	180	10440702100000000	Devina Yanti, S.E., M.S.	4	0	2	1	3	EDIT DELETE VIEW EXPORT
8	118	10440010200000000	Erni Rizki, S.E., M.S.	4	3	0	0	3	D
9	319	10440102200000000	Eva Nurhikmah, S.E., M.S.	4	2	1	0	3	D

Gambar 6. Rekapitulasi Penugasan Pendampingan pada Portal DPR RI

LAPORAN SINGKAT KEGIATAN



LAPORAN SINGKAT

- Kegiatan : Diskusi dengan senior di Bidang EKP Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (*Problem Listing*)
- Waktu Pelaksanaan : 24 Mei- 4 Juni 2018
- Tahapan Kegiatan : 1. Membuat pedoman wawancara/diskusi
2. Mendiskusikan pedoman wawancara dengan Mentor
3. Menghubungi para senior untuk memohon waktu wawancara
4. Melakukan wawancara dan diskusi mendalam dengan para senior
5. Membuat hasil laporan diskusi dan menyerahkannya kepada Mentor
6. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach

Kegiatan didahului dengan membuat pedoman wawancara yang kemudian didiskusikan dengan Mentor. Beberapa aspek yang ada di dalam draft pedoman wawancara kemudian disempurnakan dan dihasilkan Pedoman Wawancara yang terdiri dari 8 poin pertanyaan yang akan berkembang seiring dengan berjalannya diskusi dengan senior. Hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara adalah tentang apa saja beban kerja peneliti dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai, kemudian kepakaran masing-masing peneliti, dan kelompok penelitian. Selain itu, salah satu poin yang menjadi penekanan dalam proses wawancara adalah tentang penugasan pendampingan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Berdasarkan hasil diskusi dengan Mentor, terdapat 4 aspek penugasan pendampingan AKD yang bisa dijadikan variabel pendistribusian penugasan nantinya, yaitu:

1. Pendampingan Legislasi:
 - a. Penyusunan RUU
 - b. Pembahasan RUU
2. Pendampingan Pengawasan:
 - a. Rapat Kerja dengan Mitra DPR RI
 - b. Kunjungan Kerja Dalam Negeri
 - c. Kunjungan Kerja Luar Negeri
3. Pendampingan Peran Diplomasi: Berupa kunjungan kerja yang berkerjasama dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)
4. Pendampingan Unit Kerja Sekjen: Berupa pembuatan rencana kerja Pusat Penelitian, rencana anggaran Pusat Penelitian, dan pembuatan laporan yang unit kerja Pusat Penelitian.

Sebagai catatan, penugasan pendampingan yang akan dipetakan dari kalangan peneliti bidang EKP adalah yang sifatnya permintaan resmi dari AKD. Berdasarkan hasil diskusi dengan Mentor maka didapatkan hasil pedoman wawancara seperti pada Tabel 1.

Langkah berikutnya adalah memetakan jumlah peneliti di bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP) yang saat ini berjumlah 26 orang (Tabel 2). Terdapat 6 peneliti yang tidak aktif di kantor dikarenakan cuti dan melanjutkan pendidikan sehingga total peneliti senior yang bisa diwawancarai adalah 18 orang tidak termasuk Mentor dan Koordinator Bidang.

Proses wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 4 Juni 2018 terhadap 18 orang peneliti yang pada saat jangka waktu wawancara sedang tidak melakukan kegiatan di luar kantor.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan berbagai penjelasan sebagai berikut:

1. Kepakaran yang paling banyak di kalangan peneliti bidang EKP adalah Kebijakan Ekonomi (18 orang), seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.
2. Mayoritas peneliti di bidang EKP menjadi peneliti sejak tahun 2009.
3. Saat ini belum ada SOP khusus dalam menentukan peneliti yang akan melakukan pendampingan AKD. Prosedur secara umum didahului dengan adanya permintaan secara resmi dari AKD kepada Kepala Pusat Penelitian. Kepala Pusat Penelitian akan meneruskan permintaan pendampingan kepada masing-masing Koordinator Bidang, termasuk bidang EKP. Koordinator bidang EKP akan mendistribusikan permintaan tersebut kepada peneliti secara personal untuk menanyakan kesediaan melaksanakan tugas.
4. Menurut para peneliti, pemilihan individu untuk melakukan penugasan tidak dilakukan secara terbuka. Latar belakang pemilihan individu umumnya berdasarkan pengalaman penelitian yang pernah dikerjakan, kepakaran, dan kesediaan saat diberikan tugas.
5. Sifat penugasan yang umumnya butuh cepat direspon sering terkendala saat para peneliti sedang tidak ada di ruangan (sedang melakukan penelitian di luar kantor), sehingga pada saat pendelegasian tugas akan diutamakan kepada peneliti yang saat itu ada di kantor.
6. Terjadi asimetri informasi di kalangan Peneliti bidang EKP terutama terkait penugasan pendampingan. Informasi tentang permintaan pendampingan yang masuk tidak dapat diketahui oleh semua peneliti. Selain itu, sesama peneliti juga tidak mengetahui informasi terkait siapa-siapa saja yang terlibat dalam suatu tugas pendampingan.
7. Asimetri informasi menyebabkan tidak adanya transparansi dalam pendistribusian tugas pendampingan. Sebagian peneliti merasa ada ketidakadilan dalam memilih individu untuk melakukan pendampingan. Belum semua peneliti memiliki kesempatan melakukan tugas pendampingan AKD.
8. Banyak peneliti menganggap saat ini masih belum ada pembatasan yang jelas terkait tugas utama Peneliti di Badan Keahlian DPR RI antara memberikan dukungan secara penuh kepada AKD dengan melaksanakan kegiatan untuk memenuhi angka kredit sebagai syarat dari LIPI untuk kenaikan pangkat peneliti.
9. Sebagian peneliti juga merasa tugas pendampingan AKD yang merupakan tugas tambahan akan mengurangi waktu peneliti untuk melakukan tugas utamanya sebagai peneliti seperti yang tertuang dalam SKP. Hal tersebut juga menyebabkan tidak meratanya persebaran penugasan pendampingan AKD di bidang EKP.
10. Belum adanya pembobotan pekerjaan menyebabkan pembagian tugas secara umum yang dianggap tidak merata oleh sebagian peneliti bidang EKP.
11. Pendistribusian pendampingan juga terkendala belum spesifiknya kepakaran dari peneliti di EKP. Baru peneliti-peneliti Madya yang memiliki kepakaran yang spesifik, sedangkan peneliti Muda masih bersifat umum. Akibatnya ketika ada permintaan pendampingan RUU yang spesifik, misalnya tentang Nuklir, Musik, dsb., menyebabkan kurang kuatnya dukungan yang diberikan karena tidak ada peneliti yang spesifik di hal tersebut.
12. Pemetaan terkait penugasan pendampingan para peneliti pernah dibuat namun tidak terupdate sehingga tidak dapat digunakan kembali.
13. Status dan progres pelaksanaan tugas pendampingan, khususnya legislasi juga belum terdata dengan baik sehingga Koordinator Bidang tidak bisa secara cepat mengetahui informasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada SOP khusus untuk menentukan peneliti yang melaksanakan tugas pendampingan. Selain itu, pemetaan penugasan peneliti bidang EKP juga belum ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perlu adanya suatu sumber informasi berupa pemetaan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh peneliti bidang EKP untuk memudahkan Koordinator bidang dalam menentukan individu untuk melaksanakan pendampingan AKD. Pemetaan tersebut juga diharapkan menjadi sarana menghilangkan asimetri informasi di kalangan peneliti bidang EKP terkait pelaksanaan tugas pendampingan.

Kegiatan berikutnya adalah menulis laporan hasil wawancara dan melakukan diskusi penjabakan awal dengan salah satu staf Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk mendapatkan gambaran mengenai informasi apa yang dibutuhkan untuk membuat sistem pemetaan dan distribusi tugas pendampingan AKD dan melihat feasibilitas program yang akan dibuat. Berdasarkan hasil diskusi tersebut didapatkan informasi tambahan yaitu:

1. Variabel-variabel yang akan digunakan harus sudah ditentukan sehingga memudahkan untuk membuat model sistemnya.
2. Sistem bisa menggunakan sistem portal yang sudah terbangun di ekosistem IT lingkungan DPR RI sehingga tidak perlu membuat dari nol lagi.
3. Sistem yang akan dibuat akan dipasangkan pada web Pusat Penelitian sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan peneliti, khususnya peneliti bidang EKP.
4. Dibutuhkan operator untuk menjalankan sistem tersebut, dan sebaiknya operator atau admin adalah Koordinator Bidang dan penulis.

Setelah pelaksanaan kegiatan pertama maka akan dilakukan kegiatan kedua, yaitu FGD dengan Koordinator Bidang EKP yang dijadwalkan pada tanggal 22 Juni 2018. Terkait tahapan kegiatan 2 akan ditambahkan proses inventarisasi kegiatan pendampingan AKD oleh peneliti bidang EKP setelah dilaksanakannya FGD dengan Koordinator Bidang EKP untuk memperkaya data yang akan digunakan sebagai input sistem nantinya.

Jakarta, 7 Juni 2018

Penulis



Masyithah Aulia Adhiem
NIP. 198306032018012002

Mengetahui,
Mentor



Achmad Sani Alhusain, SE., MA.
NIP. 197205111999031003

LAMPIRAN TABEL

Tabel 1. Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama menjadi peneliti	
2.	Bidang kepakaran peneliti	
3.	Apakah tahu mengenai penugasan pendampingan AKD	
4.	Apakah sudah pernah mendapatkan penugasan Jika Ya: apa saja? Bagaimana proses dan perkembangannya	
5.	Siapa yang menugaskan?	
6.	Apakah mengetahui tentang penugasan terhadap peneliti lainnya? Jika Ya: mengetahui dari mana? Apakah dari sesama rekan atau dari Koordinator Bidang?	
7.	Bagaimana pendapat mengenai pembagian penugasan pendampingan? a. Kejelasan prosedur b. Keadilan c. Transparansi	
8.	Apa yang bisa ditingkatkan terkait penugasan pendampingan?	

Tabel 2. Data Kepakaran Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik

NO.	NAMA	LAMA			BARU		
		RUMPUN KEPAKARAN	BIDANG KEPAKARAN	BIDANG PENELITIAN	RUMPUN KEPAKARAN	BIDANG KEPAKARAN	BIDANG PENELITIAN
1.	Mandala Harefa, SE, M.Si			14.07.01. Kebijakan Publik	28. Ekonomi	28.05. Ekonomi Publik	28.05.03. Kebijakan dan Desentralisasi Fiskal
2.	Drs.Juli Panglima Saragih, MM.			14.07.01. Kebijakan Publik	28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	28.19.09. Kebijakan Ekonomi Regional
3.	Suhartono, S.IP., MPP.			14.07.01. Kebijakan Publik	30. Politik	30.03. Administrasi Publik	(Cuti)
4.	Achmad Sani Alhusain, SE., MA.			14.07.01. Kebijakan Publik	28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
5.	Achmad Wirabrata, ST., MM.			14.07.01. Kebijakan Publik	28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
6.	Ariesy Tri Mauleny, S.Si., ME.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	(Cuti)
7.	Ari Mulianta Ginting, SE., MSE.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
8.	Dewi Restu Mangeswuri, SE., M.Si.	12. Ekonomi	12.03.		28. Ekonomi	28.19.	

NO.	NAMA	LAMA			BARU		
		RUMPUN KEPAKARAN	BIDANG KEPAKARAN	BIDANG PENELITIAN	RUMPUN KEPAKARAN	BIDANG KEPAKARAN	BIDANG PENELITIAN
			Ekonomi Terapan			Kebijakan Ekonomi	
9.	Dewi Wuryandani, ST., MM.		14.02. Kebijakan dan Administrasi		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
10.	Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
11.	Eka Budiyanti, S.Si., MSE.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
12.	Hilma Meilani, ST., MBA.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
13.	Iwan Hermawan, SP., M.Si.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	(Cuti)
14.	Lisnawati, S.Si., M.SE.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
15.	Lukman Adam, S.Pi., M.Si.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.08. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	(Cuti)
16.	Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	

NO.	NAMA	LAMA			BARU		
		RUMPUN KEPAKARAN	BIDANG KEPAKARAN	BIDANG PENELITIAN	RUMPUN KEPAKARAN	BIDANG KEPAKARAN	BIDANG PENELITIAN
17.	Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.		14.02. Kebijakan dan Administrasi		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
18.	Rafika Sari, SE., MSE.			14.07.01. Kebijakan Publik	28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
19.	Rasbin, S.Tp., MSE.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.10. Ekonomi Perdagangan	
20.	Sahat Aditua F. Silalahi, ST., Mba.			14.07.01. Kebijakan Publik	29. Manajemen dan Kebijakan	29.02. Manajemen Industri	
21.	Sony Hendra Permana, S.E., M.SE	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
22.	T. Ade Surya, ST., MM.			14.07.01. Kebijakan Publik	28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	
23.	Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.	12. Ekonomi	12.03. Ekonomi Terapan		28. Ekonomi	28.13. Akuntansi	
24.	Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.	13. Perdagangan Manajemen, Pariwisata dan Jasa	13.02. Bisnis dan Manajemen		29. Manajemen dan Kebijakan	29.02. Manajemen Industri	(Cuti)

NO.	NAMA	LAMA			BARU		
		RUMPUN KEPAKARAN	BIDANG KEPAKARAN	BIDANG PENELITIAN	RUMPUN KEPAKARAN	BIDANG KEPAKARAN	BIDANG PENELITIAN
25.	Izzaty, S.T., M.E.			14.07.01. Kebijakan Publik	28. Ekonomi	28.19. Kebijakan Ekonomi	(Cuti)
26.	Hariyadi, SIP., MPP.			14.07.01. Kebijakan Publik	29. Kebijakan	29.08. Kebijakan Publik	29.08.17. Kebijakan Pengelolaan SDA

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Diskusi dengan Mentor



Gambar 2. Wawancara dengan Ari M.Ginting



Gambar 3. Wawancara dengan Rasbin



Gambar 4. Wawancara dengan Sahat A. Silalahi



Gambar 5. Wawancara dengan Achmad Wirabrata



Gambar 6. Wawancara dengan Rafika Sari



Gambar 7. Wawancara dengan Edmira Rivani



Gambar 8. Wawancara dengan Sonny H Permana



Gambar 9. Wawancara dengan Hariyadi



Gambar 10. Wawancara dengan Eka Budiyaniti



Gambar 11. Wawancara dengan Juli Panglima Saragih



Gambar 12. Wawancara dengan Dewi Restu



Gambar 13. Wawancara dengan T. Surya



Gambar 14. Wawancara dengan Nidya W. S



LAPORAN SINGKAT

Kegiatan	: <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan Koordinator Bidang
Waktu Pelaksanaan	: 28 Juni 2018
Tahapan Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi dengan Mentor2. Membuat undangan tertulis kepada Koordinator Bidang3. Mengirimkan undangan kepada Koordinator Bidang melalui Tata Usaha4. FGD dengan Koordinator Bidang bersama dengan Mentor5. Membuat laporan hasil FGD dan menyerahkannya kepada Mentor6. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach

Kegiatan didahului dengan membuat pedoman FGD yang kemudian didiskusikan dengan Mentor. Setelah pedoman dibuat, kemudian mengajukan pembuatan undangan atau permohonan FGD melalui Tata Usaha kepada Koordinator Bidang yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian. Undangan tersebut kemudian disampaikan kepada Koordinator Bidang dan menentukan tanggal pelaksanaan FGD yaitu pada hari Kamis, 28 Juni 2018, dilaksanakan bersama dengan Mentor.

FGD dilaksanakan dengan mengacu pada poin pertanyaan yang sudah dibuat dan dikembangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai penugasan pendampingan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hasil dari diskusi adalah sebagai berikut:

1. Kepakaran di bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP) masih terlalu umum. Sedangkan permintaan dari AKD umumnya menyangkut undang-undang (UU) dengan masalah yang cukup spesifik, misalnya: transportasi, minyak dan gas alam, musik, dan sebagainya. Sehingga ketika ada permintaan pendampingan penyusunan atau pembahasan UU maka prioritasnya adalah untuk memenuhi permintaan AKD, bukan memberikan peneliti yang sesuai bidang kepakarannya.
2. Proses permintaan pendampingan umumnya datang dari AKD kepada Kepala Pusat Penelitian untuk setelah itu didistribusikan kepada para koordinator bidang. Permintaan pendampingan dari AKD umumnya berupa 3 hal, yaitu:
 - a. Legislasi: Penyusunan dan Pembahasan UU
 - b. Pengawasan: Pengawasan pelaksanaan UU, umumnya berupa kunjungan kerja
 - c. Anggaran: untuk anggaran saat ini Pusat Penelitian sudah tidak terlalu banyak terlibat karena sudah ada Analisis APBN di unit kerja lain.
3. Selain AKD, Pusat Penelitian juga mendapatkan permintaan pendampingan dari Sekretariat Jenderal untuk penugasan yang terkait dengan Kesekretariatan misalnya: penyusunan RKAKL, pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), dan sebagainya.
4. Untuk peneliti bidang EKP pada umumnya terlibat dalam penyusunan dan pembahasan UU yang dikerjakan oleh Komisi IV, V, VI, VII, dan XI. Namun saat ini dengan sudah adanya Tenaga Ahli maka permintaan dari komisi lain sudah banyak berkurang kecuali Komisi VI yang masih aktif meminta keikutsertaan peneliti.

5. Proses distribusi kepada peneliti bidang dilakukan oleh Koordinator Bidang dengan cara menanyakan langsung kesediaan kepada peneliti secara individu. Ketika peneliti tidak dapat menerima penugasan tersebut maka Koordinator Bidang akan mencari individu lainnya. Proses distribusi harus dilaksanakan dengan cepat karena tenggat waktu untuk menentukan peneliti yang akan ditunjuk juga mendesak sedangkan Pusat Penelitian tidak bisa menolak permintaan dari AKD.
6. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan peneliti untuk melakukan tugas pendampingan adalah:
 - a. Kepakaran: Koordinator Bidang akan terlebih dahulu melihat kepakaran mana yang sesuai dengan materi rencana UU yang akan disusun atau dibahas.
 - b. Pengalaman penelitian sebelumnya: Karena kepakaran yang ada di Bidang EKP masih banyak yang terlalu umum, maka Koordinator Bidang akan melihat keterkaitan antara materi UU dengan pengalaman penelitian sebelumnya dari para peneliti di Bidang EKP.
 - c. Kehadiran: Saat permintaan dari AKD datang maka Koordinator hanya bisa menugaskan kepada peneliti yang hadir di kantor pada saat itu mengingat nama-nama peneliti harus sudah diserahkan kepada AKD dalam waktu cepat.
 - d. Kesiapan: Koordinator Bidang baru akan menugaskan peneliti setelah mendapatkan persetujuan dari peneliti tersebut.
7. Semakin banyaknya rencana penyusunan UU yang spesifik menyebabkan sulit untuk memberikan pendampingan dari peneliti yang memiliki kepakaran yang benar-benar serupa. Hal yang menjadi prioritas saat ini adalah pemenuhan kebutuhan pendampingan AKD tanpa melihat kesesuaian kepakaran peneliti.
8. Proses monitoring hingga saat ini belum ada. Yang mudah untuk dimonitor adalah pengawasan karena umumnya pelaksanaan hanya beberapa hari. Sedangkan untuk pendampingan legislasi sulit untuk dimonitor. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali faktor yang mempengaruhi lama atau tidaknya proses penyusunan dan pembahasan UU.
9. Kendala-kendala yang dihadapi oleh koordinator bidang dalam menentukan peneliti untuk penugasan pendampingan AKD adalah:
 - a. Permintaan dari AKD atau Sekretariat Jenderal tidak disertai dengan surat resmi yang dikirimkan kepada Kepala Pusat Penelitian. Hal tersebut menyebabkan Pusat Penelitian tidak bisa memberikan jawaban resmi apabila menunjuk atau jika terpaksa menolak permintaan tersebut.
 - b. Kepakaran di EKP masih banyak yang terlalu umum dan terkadang tidak konsisten dengan latar belakang pendidikan. Hal tersebut menyebabkan ketika ada permintaan untuk penyusunan dan pembahasan UU yang sifatnya spesifik maka pemilihan individu peneliti akan terkendala.
 - c. Penugasan pendampingan merupakan tugas tambahan di luar tugas utama yang sudah ada di Sasaran Kinerja Pegawai Peneliti. Hal tersebut berakibat para peneliti tidak menjadikan tugas penugasan sebagai prioritas sehingga ketika ditanyakan kesediaannya banyak yang merasa keberatan ketika masih banyak tugas utama yang harus diselesaikan.

- d. Masih terjadi penumpukan penugasan pada sejumlah peneliti akibat rentang waktu penyelesaian penyusunan dan atau pembahasan UU sangat tidak pasti. Sehingga ketika suatu penyusunan dan atau pembahasan UU yang menjadi tugas seorang peneliti tidak aktif, namun karena dianggap masih memegang suatu UU maka peneliti tersebut tidak akan mendapatkan penugasan sejenis. Sedangkan di saat yang bersamaan ada peneliti lain yang sudah selesai penugasan terkait penyusunan dan atau pembahasan UU sehingga sudah diberi penugasan yang baru.
 - e. Tidak adanya platform terkait monitoring juga menyebabkan para peneliti tidak bisa memberikan informasi terkini tentang penugasan yang diterima.
10. Berdasarkan pemetaan kendala yang terjadi, maka dirumuskan beberapa alternatif solusi, yaitu:
- a. Ketika materi UU sangat spesifik, maka solusi jangka pendeknya adalah dengan mengadakan FGD dengan tenaga ahli di luar tim peneliti. Melalui FGD tersebut diharapkan memperkaya pengetahuan peneliti dan tim penyusun UU.
 - b. Solusi jangka panjang adalah dengan merekrut pegawai dengan latar belakang pendidikan yang lebih beragam. Selain itu juga perlu diadakan kursus/diklat/*in house training* bagi para peneliti untuk memperdalam kepakaran dan penyusunan UU.
 - c. Proses monitoring dari pelaksanaan tugas harus dapat dilakukan oleh Koordinator Bidang, oleh karena itu diperlukan suatu *platform* yang berisikan informasi tentang peneliti, pengalaman penelitian, dan perkembangan dari tugas pendampingan yang sedang dikerjakan. Data-data yang dibutuhkan oleh Koordinator Bidang dapat dilihat pada Tabel 1.
 - d. Perlu ada pembobotan pekerjaan sebelum dilakukan pemilihan individu untuk pendampingan AKD. Misal untuk penyusunan atau pembahasan UU maka dihitung beban tahun takwim nya adalah 1 tahun, sedangkan untuk pengawasan maka mungkin bisa hanya dibebankan selama 1 bulan (Termasuk masa persiapan dan penulisan laporan). Sehingga idealnya setiap peneliti maksimal hanya memegang 2 tugas terkait penyusunan/pembahasan UU.
 - e. Pembobotan pekerjaan juga perlu diterapkan pada pekerjaan tambahan lainnya seperti tugas pendampingan dari sekretariat jenderal dan tim pidato.
 - f. Keputusan tugas dari Kepala Pusat Penelitian bahwa semua permintaan pendampingan harus melalui surat resmi yang ditujukan kepada Pusat Penelitian.

Jakarta, 29 Juni 2018

Penulis



Masyithah Aulia Adhiem
NIP. 198306032018012002

Mengetahui,
Mentor



Achmad Sani Alhusain, SE., MA
NIP. 197205111999031003

LAMPIRAN

Pedoman Pertanyaan *Focus Group Discussion*

1. Keragaman kepakaran peneliti di EKP
2. Proses penerimaan permintaan tugas pendampingan AKD
3. Proses distribusi tugas pendampingan AKD
4. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan peneliti untuk melakukan tugas pendampingan AKD
5. Proses monitoring dari penugasan tersebut
6. Pemetaan pelaksanaan tugas pendampingan AKD di Bidang EKP
7. Kendala dalam melakukan distribusi penugasan
8. Kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi penugasan

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. FGD dengan Koordinator Bidang dan Mentor



Gambar 2. FGD dengan Koordinator Bidang dan Mentor



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

BK/10540/SETJEN-DPRRI/PP/06/2018

Kepada : Koordinator Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Dari : Kepala Pusat Penelitian Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
Hal : Permohonan pelaksanaan Diskusi
Tanggal : 26 Juni 2018

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian Setjen dan Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2018 telah menerima CPNS Jabatan Fungsional atas nama :

No.	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	Masyithah Aulia Adhiem, M.E	III	Calon Peneliti Pertama

Dimana pada saat ini, yang bersangkutan sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka kegiatan Aktualisasi sebagai salah satu syarat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Dasar, mohon perkenan Saudara kiranya kepada nama tersebut dapat diizinkan untuk melakukan diskusi tentang penugasan pendampingan AKD di lingkungan Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 197111171998031004

Tembusan :
Kepala Badan Keahlian DPR RI.



LAPORAN SINGKAT

Kegiatan	: Wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian
Waktu Pelaksanaan	: 10 Juli 2018
Tahapan Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun pedoman wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian2. Konsultasi dengan Mentor terkait pedoman wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian3. Membuat Surat Permohonan Audiensi dengan Kepala Pusat Penelitian4. Mengirimkan Permohonan Audiensi dengan Kepala Pusat Penelitian melalui Tata Usaha5. Pelaksanaan wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian bersama dengan Mentor6. Membuat laporan hasil wawancara dan menyerahkannya kepada Mentor dan Coach7. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach

Kegiatan didahului dengan membuat pedoman wawancara kemudian mendiskusikannya dengan Mentor. Berdasarkan hasil diskusi dengan Mentor, maka didapatkan kesimpulan

1. Wawancara akan dilakukan dengan melakukan eksplorasi atas hasil FGD dengan Koordinator Bidang sebelumnya
2. Wawancara akan meminta persetujuan Kepala Pusat Penelitian atas sistem monitoring dan distribusi yang akan dibuat.
3. Pedoman wawancara yang dibuat adalah seperti yang terdapat pada Lampiran.

Berdasarkan hasil wawancara, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

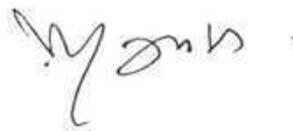
1. Kondisi yang sudah disampaikan oleh Koordinator Bidang sudah diketahui oleh Kepala Pusat Penelitian, dan kendala tersebut sudah terjadi sejak lama.
2. Upaya untuk membuat suatu pemetaan dan monitoring sudah pernah dilakukan meskipun masih secara manual. Namun data tersebut tidak terbaharui karena tidak ada admin khusus untuk melakukan input dan perbaharuan data.
3. Untuk membuat suatu sistem terintegrasi akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama karena saat ini Bidang Data dan Teknologi Informasi dalam kondisi banyak mengerjakan pembuatan aplikasi teknis.
4. Sistem monitoring dan distribusi yang akan dibuat sebaiknya memuat informasi-informasi yang cukup komprehensif. Sebagai contoh adalah data para dosen yang ada di web LPPM UNS Solo meskipun hanya bisa diakses oleh pegawai.
5. Jika belum memungkinkan untuk membuat sistem yang sepenuhnya terintegrasi maka minimal sistem yang dibuat adalah sistem pendataan yang bisa diakses bersama berisi data yang sudah disepakati dengan Koordinator Bidang sebelumnya. Selain itu perlu ada admin yang bertanggungjawab untuk selalu memperbaharui data.

6. Untuk memudahkan sistem monitoring tersebut maka perlu dibuat *clustering* para peneliti, khususnya di bidang EKP. *Clustering* dilakukan berdasarkan keterkaitan antara kepakaran dan penelitian sebelumnya dengan Komisi yang terkait dengan EKP, yaitu Komisi IV, V, VI, VII, dan XI (Tabel 1.)
7. Koordinasi dengan BDTI perlu segera dilakukan untuk mencari alternatif sistem jika tidak memungkinkan untuk dibuat dalam bentuk terintegrasi secara digital saat ini.

Jakarta, 12 Juli 2018

Mengetahui
Mentor

Peserta Latsar,
CPNS



Achmad Sani Alhusain, SE., MA.
NIP. 197205111999031003

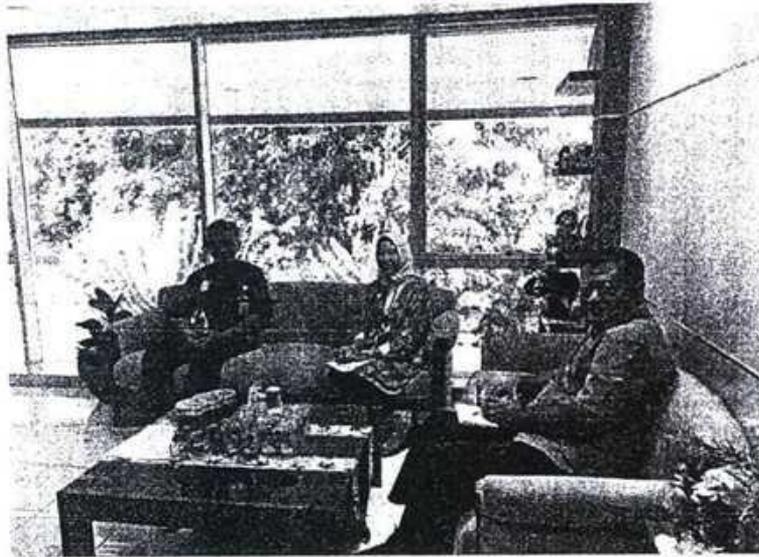
Masyithah Aulia Adhiem, M.E.
NIP. 198306032018012002

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian

1. Apakah Kepala Pusat Penelitian mengetahui tentang kondisi yang dialami oleh Koordinator Bidang?
2. Apakah Kepala Pusat Penelitian setuju tentang adanya kebutuhan pemetaan penugasan pendampingan AKD?
3. Hal-hal apa yang perlu dilengkapi dari tabel data distribusi yang sebelumnya sudah disusun bersama dengan Koordinator Bidang dan Mentor?

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian



LAPORAN SINGKAT

Kegiatan	: Diskusi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)
Waktu Pelaksanaan	: 16 dan 24 Juli 2018
Tahapan Kegiatan	: 1. Memetakan kebutuhan sistem online untuk monitoring dan distribusi penugasan pendampingan AKD 2. Diskusi dan konsultasi dengan Mentor terkait kebutuhan sistem online distribusi penugasan pendampingan AKD 3. Membuat surat permohonan wawancara dengan BDTI 4. Mengirimkan surat permohonan diskusi dengan BDTI melalui Tata Usaha 5. Pelaksanaan diskusi dengan BDTI 6. Membuat laporan hasil wawancara dan menyerahkannya kepada Mentor dan Coach 7. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach

Kegiatan keempat adalah diskusi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) terkait kebutuhan sistem distribusi penugasan pendampingan AKD di Bidang EKP. Kegiatan didahului dengan membuat *raw data* berupa Tabel yang berisi variabel-variabel yang akan digunakan dalam membuat sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan AKD berdasarkan hasil diskusi dengan Koordinator Bidang dan Kepala Pusat Penelitian (Tabel 1). Tabel tersebut memuat informasi yang dibutuhkan oleh Koordinator Bidang dan Kepala Pusat Penelitian untuk memudahkan proses pemantauan penugasan dan evaluasi atas penugasan tersebut. Data yang dibutuhkan untuk saat ini antara lain:

1. Data Peneliti: Berisikan data dasar masing-masing peneliti di Bidang EKP. Terbagi lagi menjadi:
 - a. Nama Peneliti : Nama lengkap beserta gelar
 - b. Jabatan : Jabatan fungsional sebagai Peneliti
 - c. Latar belakang: Pendidikan peneliti dari jenjang S1 hingga S2/S3
 - d. Kepakaran : rumpun/bidang/Bidang Penelitian
2. Cluster: *Clustering* merupakan pengelompokan para peneliti dari bidang EKP berdasarkan bidang yang terkait dengan komisi-komisi yang banyak dilayani oleh bidang EKP, yaitu:
 - a. Komisi IV : Pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan
 - b. Komisi V : Infrastruktur dan perhubungan
 - c. Komisi VI : Industri, investasi, dan persaingan usaha
 - d. Komisi VII : Energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup
 - e. Komisi XI : Keuangan dan perbankan
3. Penelitian dan penugasan di Tahun 2017 :
 - a. Penelitian : Penelitian individu dan penelitian kelompok
 - b. Pendampingan: Penugasan pendampingan AKD khusus untuk legislasi, disertai dengan status terakhir dari RUU yang disusun/dibahas.

4. Penelitian dan penugasan di Tahun 2018 :
 - a. Penelitian : Penelitian individu dan penelitian kelompok
 - b. Pendampingan: Penugasan pendampingan AKD yang terdiri dari Legislasi dan Pengawasan.
 - c. Sekretariat Jenderal: Penugasan lain yang terkait dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Setelah Tabel tersebut dibuat maka dilanjutkan dengan pembuatan konsep surat permohonan diskusi kepada BDTI dan memberikan konsep tersebut kepada Tata Usaha Pusat Penelitian.

Diskusi dilaksanakan dengan salah satu staf BDTI secara berkala dengan topik bahasan sebagai berikut:

1. Peserta Latsar memberikan penjelasan terkait kebutuhan sistem distribusi penugasan pendampingan AKD di lingkungan peneliti khususnya bidang EKP.
2. Diskusi dilanjutkan dengan melihat Tabel 1 yang sudah dibuat sebelumnya dan mempertimbangkan apakah data yang ada bisa dimasukkan ke dalam suatu sistem dan menurut pihak BDTI memungkinkan untuk dibuat suatu sistem berdasarkan tabel tersebut karena banyak data yang sudah tersedia di database Portal DPR.
3. Pihak BDTI kemudian membuka situs web penelitian dan portal DPR untuk menunjukkan informasi apa saja yang sudah tersedia di situs tersebut. Berdasarkan data yang ada sudah ada beberapa variabel/informasi yang sudah tersedia pada database di Portal DPR (Gambar 1-4), yaitu:
 - a. Data pribadi peneliti
 - b. Kepakaran peneliti
 - c. Bidang Penelitian
 - d. Riwayat Penelitian
 - e. Aktivitas di Sekretariat Jenderal
4. Beberapa informasi yang sudah ada diharapkan tidak perlu diganti, yang perlu dilakukan adalah menambahkan variabel informasi dari database yang sudah ada.
5. Jika diperlukan maka bisa juga dilakukan penyesuaian istilah dalam database sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan (Tabel 2). Data yang berbeda antara tabel awal yang sudah dibuat dengan database portal DPR RI adalah:

No	Keterangan pada Tabel Awal (Raw database)	Keterangan pada Database Portal DPR RI
1.	Clustering	(tidak ada di database)
2.	Kepakaran Rumpun	(tidak ada di database)
3.	Kepakaran Bidang	Kepakaran
4.	Kepakaran Bidang Penelitian	Bidang Peminatan
5.	Penelitian TA 2017	Riwayat Penelitian
6.	Pemdampingan AKD TA 2017	Aktivitas di Setjen DPR RI
7.	Penelitian TA 2018	(belum terpisah dari Tab Riwayat Penelitian)
8.	Tim	(tidak ada di database)
9.	Pendampingan Legislasi AKD 2018	(belum terpisah dari Tab Aktivitas di Setjen DPR RI)
10.	Pendampingan Pengawasan AKD 2018	(tidak ada di database)
11.	Sekretariat Jenderal	(belum terpisah dari Tab Aktivitas di Setjen DPR RI)

Berdasarkan tabel tersebut kemudian dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan ketersediaan data yang ada sehingga dihasilkan Tabel 2.

6. Pusat Penelitian sendiri sudah memiliki website yang di dalamnya terdapat daftar nama peneliti. Meskipun demikian, informasi yang bisa didapatkan dari web tersebut hanyalah data dasar dari peneliti: Nama Peneliti, Foto, dan kepakaran (Gambar 2). Sesuai dengan hasil diskusi dengan Kepala Pusat Penelitian sebelumnya, yang diharapkan adalah nantinya tiap-tiap foto Peneliti dapat di *dropdown* dan menampilkan informasi seperti penelitian dan penugasan AKD.
7. Namun hingga saat ini masih banyak kolom informasi yang kosong karena belum adanya pembaruan data. Agar data yang terintegrasi dapat berguna maka perlu ada pembaruan data yang dilakukan oleh admin dari bidang EKP.
8. Hal berikutnya yang harus dipersiapkan adalah membuat Surat Permintaan Hak Akses Aplikasi Pusat Penelitian yang ditujukan kepada BDTI. Surat tersebut bertujuan memberikan izin akses bagi Peserta Latsar/Penulis untuk memperbaharui data.
9. Apabila database sudah sesuai dengan kebutuhan sistem distribusi pendampingan penugasan AKD maka yang proses selanjutnya adalah integrasi data yang berasal dari database Portal DPR RI dengan web Pusat Penelitian sehingga diharapkan nantinya informasi dari database yang baru akan dapat terlihat di masing-masing peneliti bidang EKP.

Jakarta, 25 Juli 2018

Mengetahui
Mentor



Achmad Sani Alhusain, SE., MA.
NIP. 197205111999031003

Peserta Latsar,
CPNS



Masyithah Aulia Adhiem, M.E.
NIP. 198306032018012002

LAMPIRAN

Pedoman Diskusi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI):

1. Penyampaian tujuan kegiatan
2. Penyampaian konsep produk akhir yang dibutuhkan
3. Kemungkinan untuk dibuat suatu sistem seperti yang diharapkan
4. Hal-hal apa yang perlu dilengkapi dari tabel data distribusi yang sebelumnya sudah disusun bersama dengan Kepala Pusat Penelitian, Koordinator Bidang dan Mentor
5. Tahap awal dalam membangun sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Tampilan Database Portal



Gambar 2. Tampilan Database Portal



Gambar 3. Tampilan Database Portal



Gambar 4. Tampilan Database Portal



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

BK/11952/SETJEN DAN BK-DPRRI/PP/07/2018

Kepada : Kabid. Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR RI *SP*
Dari : Kepala Pusat Penelitian Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
Hal : Permohonan pelaksanaan Diskusi
Tanggal : 16 Juli 2018

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian Setjen dan Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2018 telah menerima CPNS Jabatan Fungsional atas nama :

No.	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	Masyithah Aulia Adhiem, M.E. NIP. 19830603 201801 2 002	III	Calon Peneliti Pertama

dimana pada saat ini, yang bersangkutan sedang mengikuti Diklat Pra Jabatan CPNS Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pembuatan Rencana Kegiatan Aktualisasi sebagai salah satu materi Diklat Pra Jabatan, mohon perkenan Saudara kiranya kepada nama tersebut diatas, dapat diijinkan untuk melakukan **diskusi** dengan **Pejabat Fungsional Pranata Komputer** tentang **Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan dari AKD**.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 197111171998031004

Tembusan :

1. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
2. Kepala Pusdatin Setjen dan BK DPR RI.



LAPORAN SINGKAT

Kegiatan	: Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD (I)
Waktu Pelaksanaan	: 25 Juli s.d. 14 September 2018
Tahapan Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Diskusi dengan BDTI.2. Membuat draft Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD.3. Pembuatan Permohonan Izin Akses.4. Pengisian Database.5. Pemaparan draft kepada Kepala Pusat Penelitian, Koordinator Bidang EKP , Coach, dan Mentor6. Ujicoba dan review Sistem7. Diskusi dan konsultasi dengan Mentor dan Coach terkait finalisasi sistem8. Diskusi dengan BDTI9. Finalisasi Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD10. Penyerahan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan kepada Koordinator Bidang EKP

Kegiatan terakhir dari rancangan aktualisasi adalah Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD, khususnya untuk Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Tahap pertama dari kegiatan ini adalah membuat draft sistem dengan berpedoman pada sistem yang sudah ada, yaitu Database Pusat Penelitian Portal DPR RI dan Website Pusat Penelitian, yang keduanya dikelola oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI). Draft sistem dibuat dari data awal berupa informasi yang dirasa penting untuk dapat dengan mudah diakses oleh Koordinator Bidang sebelum melakukan penugasan peneliti untuk melaksanakan pendampingan AKD.

Informasi yang dibutuhkan untuk dapat diakses terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) Data pribadi Peneliti, (2) Kegiatan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Peneliti sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan (3) Kegiatan tambahan berupa pendampingan AKD dan tugas yang terkait dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Data pribadi peneliti berisikan informasi sebagai berikut:

1. Nama Peneliti: Nama lengkap Peneliti beserta gelar (*data field* sudah ada)
2. Jabatan Peneliti: Peneliti Pertama/Muda/Madya/Utama (*data field* sudah ada)
3. Latar Belakang Pendidikan: S1/S2/S3 (*data field* sudah ada)
4. Kepakaran Bidang: Diisi sesuai rumpun kepakaran (*data field* sudah ada)
5. Kepakaran Bidang Penelitian/Peminatan: Diisi sesuai rumpun kepakaran (*data field* sudah ada)

Kegiatan Sesuai SKP berisikan informasi sebagai berikut:

1. Penelitian: Judul penelitian yang sudah dan sedang dilakukan serta tahun pelaksanaan penelitian (*data field* sudah ada)
2. Info Singkat: Judul tulisan yang dimuat di dalam Info singkat disertai nomor dan tahun Info Singkat. (*data field* sudah ada)

3. Jurnal "Kajian": Judul tulisan yang dimuat di dalam Jurnal Kajian disertai nomor dan tahun terbitan Jurnal. (data *field* sudah ada)
4. Jurnal Kepakaran: Judul tulisan yang dimuat di dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik disertai nomor dan tahun terbitan jurnal. (data *field* sudah ada)
5. Buku Tim: Judul tulisan yang dimuat di Buku Tim disertai tahun terbitan buku (data *field* sudah ada).
6. Buku Lintas Tim: Judul tulisan yang dimuat di Buku Lintas Tim disertai tahun terbitan buku (data *field* sudah ada).
7. Buku Individu: Judul buku yang diterbitkan dan tahun terbitan buku (data *field* sudah ada).

Kegiatan tambahan berupa pendampingan AKD dan tugas yang terkait dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berisi informasi sebagai berikut:

1. Legislasi: Nama kegiatan yang ditugaskan disertai dengan pemberi tugas, tahapan, dan tanggal-tahun penugasan. Pemberi tugas dalam hal ini adalah pilihan antara Badan Legislasi, Komisi, dan Pansus Undang-Undang. (data *field* belum tersedia)
2. Pengawasan: Nama kegiatan yang ditugaskan disertai dengan pemberi tugas, lokasi, dan tanggal-tahun penugasan. Pemberi tugas dalam hal ini adalah pilihan antara Pimpinan, BKSAP, BURT, BKD, dan Pansus Undang-Undang. (data *field* belum tersedia)
3. Aktivitas di Sekretariat Jenderal DPR RI: Nama Kegiatan yang ditugaskan disertai dengan tahun penugasan (data *field* sudah ada).

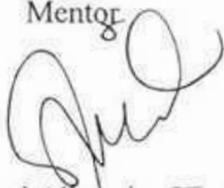
Data **Aktivitas di Sekretariat Jenderal DPR RI** yang sudah ada masih memuat informasi yang tercampur antara penugasan yang memang diberikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dengan pendampingan AKD. Oleh karena itu nantinya perlu dilakukan penyesuaian yaitu pemisahan sesuai kriteria yang sudah dibuat di atas. Pemisahan tersebut akan dilakukan secara manual oleh admin pengisi database, yang dalam hal ini akan dilakukan oleh CPNS Peserta Latsar.

Tahap berikutnya adalah meminta persetujuan Kepala Pusat Penelitian terkait perubahan variabel-variabel yang sudah dibuat pada Tabel 1 dan melakukan update atas data pegawai peneliti bidang EKP. Selain itu juga meminta izin untuk melakukan integrasi antara Database Pusat Penelitian Portal DPR RI dengan Website Pusat Penelitian. Kegiatan diteruskan dengan membuat surat permohonan kepada BDTI untuk mendapatkan hak akses aplikasi Pusat Penelitian untuk melakukan input dan perubahan data para peneliti bidang EKP.

Kondisi Database Pusat Penelitian yang berada pada Portal DPR RI yang ada saat ini adalah banyak yang masih kosong sehingga perlu dilakukan pengisian secara manual dengan menggunakan Tabel/Matriks yang sudah sesuai dengan *data field* pada database (Lihat Tabel 1). Mengingat masih banyak informasi yang dibutuhkan untuk mengisi, maka dilakukan kembali pembaruan data dengan menanyakan kepada para peneliti di bidang EKP terkait hal-hal yang terdapat dalam Tabel 1 termasuk informasi terkait legislasi dan pengawasan yang merupakan data baru. Jangka waktu kegiatan yang akan diisi adalah penugasan yang dilakukan pada tahun 2017-2018.

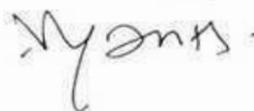
Jakarta, 14 September 2018

Mengetahui
Mentor



Achmad Sani Alhusain, SE., MA.
NIP. 197205111999031003

Peserta Latsar,
CPNS



Masyithah Aulia Adhiem, M.E.
NIP. 198306032018012002

LAMPIRAN

Pedoman Diskusi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI):

1. Penyampaian tujuan kegiatan
2. Penyampaian konsep produk akhir yang dibutuhkan
3. Kemungkinan untuk dibuat suatu sistem seperti yang diharapkan
4. Hal-hal apa yang perlu dilengkapi dari tabel data distribusi yang sebelumnya sudah disusun bersama dengan Kepala Pusat Penelitian, Koordinator Bidang dan Mentor
5. Tahap awal dalam membangun sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Tampilan Database Portal



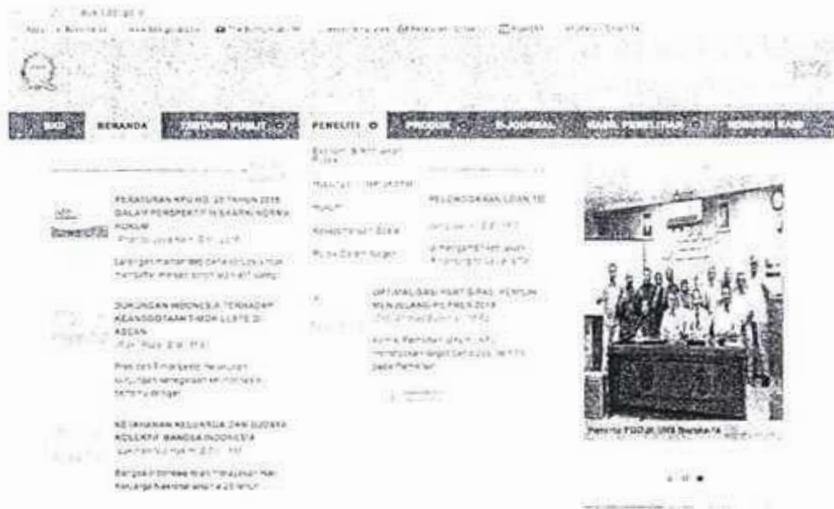
Gambar 2. Tampilan Database Portal



Gambar 3. Tampilan Database Portal



Gambar 4. Tampilan Database Portal



Gambar 5. Tampilan Website Pusat Penelitian



Gambar 6. Tampilan Data Peneliti pada Website Pusat Penelitian



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor: BK/13105/SETJEN DAN BK-DPRRI/PP/08/2018

T. Terima

Kepada Yth. : Kabid. Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR RI
Dari : Kepala Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR RI
Hal : Permohonan Hak Akses Aplikasi Pusat Penelitian
Tanggal : 2 Agustus 2018

 2/8-18

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2018 telah menerima CPNS Jabatan Fungsional atas nama:

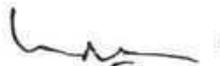
No.	Nama	Gol.	Jabatan
1.	Masyithah Aulia Adhiem, M.E. NIP. 198306032018012002	III	Calon Peneliti Pertama

Dimana pada saat ini, yang bersangkutan sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) CPNS Setjen dan BK DPR RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi sebagai salah satu materi Diklatsar, mohon perkenan Saudara kiranya kepada nama tersebut di atas dapat diizinkan untuk mendapatkan Hak Akses Aplikasi Pusat Penelitian untuk melakukan input dan update data Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian,



Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP.19711117 199803 1 004

Tembusan:

1. Kepala Badan Keahlian DPR RI
2. Kepala Pusdatin Setjen dan BK DPR RI



LAPORAN SINGKAT

Kegiatan	: Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD (II)
Waktu Pelaksanaan	: 12 September 2018
Tempat	: Rg. Rapat Pusat Penelitian
Ketua Rapat	: Kepala Pusat Penelitian
Anggota Rapat	: (Terlampir)
Acara	: Paparan hasil pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD di Bidang EKP

Salah satu tahapan dari kegiatan kelima program habituasi adalah memaparkan hasil pra-final kepada Kepala Pusat Penelitian, Mentor, Coach, dan rekan-rekan sesama calon Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Kegiatan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan atas sistem yang sudah dibuat dalam rangka penyempurnaan sistem. Rapat didahului dengan memaparkan hasil yang sudah dibuat, kemudian diikuti dengan pemberian arahan, masukan, dan koreksi dari peserta rapat yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Arahan/ Masukan/ Koreksi
1.	Kepala Pusat Penelitian Dr. Indra Pahlevi S.IP., M.Si.	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem yang dibuat harus dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penguji saat sidang rancangan aktualisasi yang lalu.2. Sistem yang sudah sudah cukup baik namun masih belum tampak adanya monitoring.3. Proses <i>entry data</i> di EKP sebaiknya dilanjutkan oleh pembuat sistem sampai pertengahan 2019. Nantinya akan ada petugas tersendiri yang meneruskan.4. Jika sistem yang dibangun dirasakan manfaatnya, maka bisa diterapkan untuk semua bidang di Pusat Penelitian.5. Sistem nantinya bisa diintegrasikan ke suatu sistem baru Pusat Penelitian untuk merekapitulasi data seluruh peneliti di Pusat Penelitian.
2.	Koordinator Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP) Mandala Harefa, S.E., M.Si.	<ol style="list-style-type: none">1. Teknik penyampaian hasil perlu diperbaiki agar lebih runut, terstruktur, dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rancangan proposal.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepakaran yang ada di EKP mengalami pembaruan, harus disesuaikan dengan penamaan kepakaran yang baru. 3. Perlu dipersiapkan <i>raw data</i> sebagai basis data untuk pengembangan sistem. 4. Keberlanjutan input data sangat penting, jangan sampai berhenti di tengah jalan. 5. Penting untuk dibuat SOP proses input data sehingga jika nantinya mudah dikerjakan oleh orang lain.
3.	<p><i>Coach</i> DR. Ujianto Singgih P. M.Si.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem yang dibuat belum menjawab kebutuhan penyelesaian isu yang diajukan pada rancangan aktualisasi. 2. Sistem yang ada hanya menampilkan riwayat pekerjaan saja, lalu bagaimana dengan pekerjaan tahun berjalan? Hal tersebut perlu untuk ditampilkan juga. 3. Untuk monitoring pendistribusian penugasan pendampingan masih belum tampak di sistem. 4. Sistem monitoring yang dibutuhkan harus ditampilkan dalam 1 halaman data. Sistem yang sudah dibuat masih mengharuskan Koordinator Bidang dan Kepala Pusat Penelitian membuka data peneliti satu per satu sehingga tidak efisien. 5. Pembobotan juga tetap perlu dibuat. 6. Sistem monitoring sebaiknya dibuat dalam bentuk excel/tabel. Tabel tersebut memuat rekapitulasi dari penugasan pendampingan yang diterima oleh masing-masing peneliti selama tahun anggaran berjalan. Dari tabel tersebut harus bisa menggambarkan distribusi penugasan pendampingannya. 7. Tabel yang dibuat juga harus bisa memberikan <i>alert/warning system</i> ketika seorang peneliti sudah mendapatkan penumpukan tugas pendampingan. 8. Tabel monitoring yang akan dibuat harus dapat dengan mudah diakses oleh Koordinator Bidang dan Kepala Pusat Penelitian. Namun tabel tersebut tidak boleh terbuka aksesnya untuk umum karena memuat beban kerja. 9. Jika memungkinkan, maka tabel tersebut bisa diintegrasikan ke dalam web/ portal. Namun jika tidak maka tabel harus tetap ada untuk digunakan sebagai jawaban atas isu yang diajukan.

4.	Mentor Achmad Sani Alhusain S.E., M.A.	<ol style="list-style-type: none">1. Seharusnya bisa diberikan kemudahan akses terhadap SKP masing-masing peneliti2. Proses input data oleh cpns bisa dilakukan sampai pertengahan 2019, namun untuk selanjutnya perlu ada petugas khusus yang secara rutin memperbaharui data.3. Setuju bahwa perlu ada rekapitulasi data untuk tahun berjalan sehingga memudahkan proses monitoring dan distribusi.4. Pembobotan bisa dilakukan bisa tidak, namun lebih baik jika ada pembobotan. Hal tersebut karena pekerjaan tertentu memakan waktu dan tenaga lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Misalnya pendampingan Legislasi biasanya memiliki durasi yang lama (bisa mencapai tahunan) dibandingkan pelaksanaan pengawasan akan selesai dalam kurun waktu 1-2 minggu.
----	--	--

Jakarta, 14 September 2018

Mengetahui
Mentor

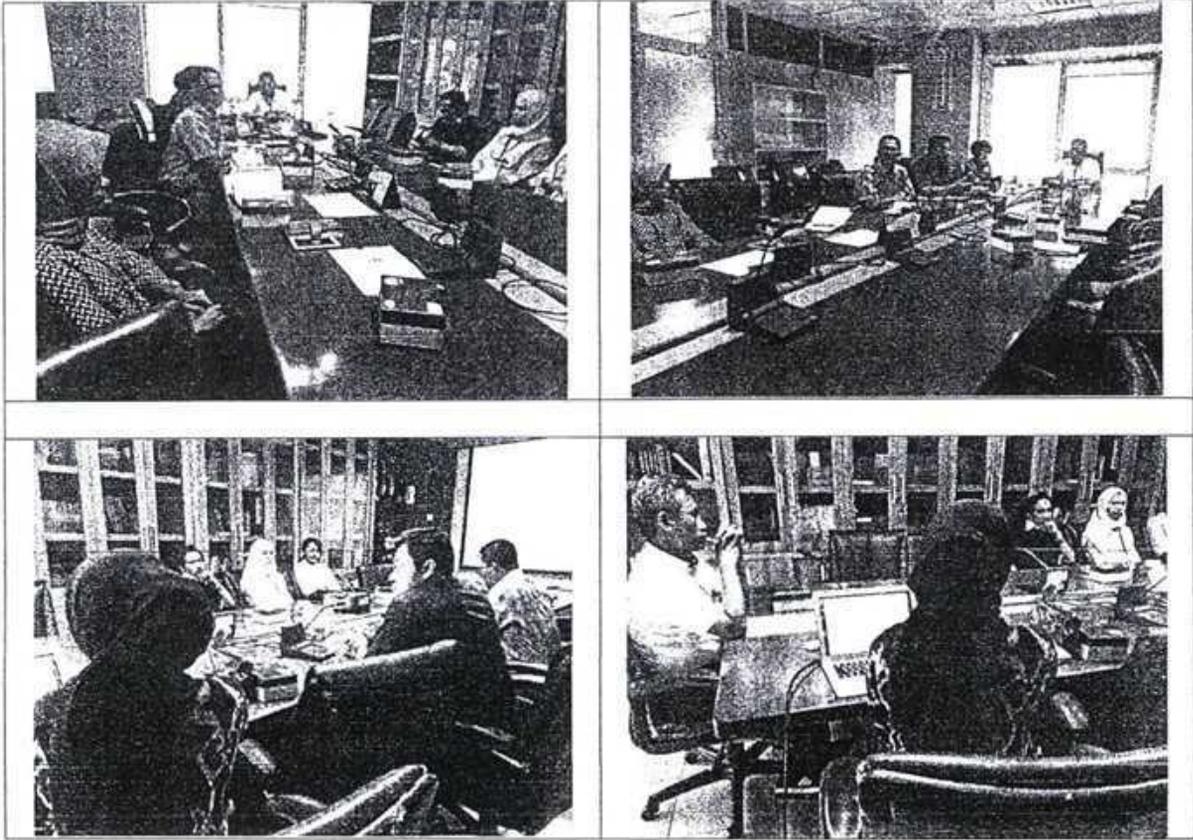
Peserta Latsar,
CPNS



Achmad Sani Alhusain, SE., MA.
NIP. 197205111999031003

Masyithah Aulia Adhiem, M.E.
NIP. 198306032018012002

Foto Kegiatan





LAPORAN SINGKAT

Kegiatan	: Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD (III)
Waktu Pelaksanaan	: 27 September 2018
Tahapan Kegiatan	: Penyerahan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI kepada Koordinator Bidang EKP

Tahapan berikutnya adalah melakukan finalisasi sistem berdasarkan masukan dan arahan yang diterima pada saat ujicoba sistem di tahapan sebelumnya. Salah satu hal penting yang harus diperbaiki dari draft sistem adalah penambahan suatu bentuk rekapitulasi penugasan pendampingan yang disampaikan oleh Coach.

Rekapitulasi penugasan pendampingan dibuat dalam bentuk tabel baru (Tabel 1) dan kemudian didiskusikan dengan BDTI untuk dapat diterapkan dalam sistem. Tabel yang dibuat memuat data jumlah penugasan pendampingan yang dilaksanakan oleh masing-masing peneliti. Rekapitulasi memuat ringkasan data terkait tugas pendampingan selama tahun berjalan untuk masing-masing peneliti. Data yang direkapitulasi yaitu:

- Jumlah tugas pendampingan legislasi yang masih aktif hingga tahun 2018.
- Jumlah tugas pendampingan pengawasan yang dilaksanakan di tahun 2018
- Jumlah tugas pendampingan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI selama tahun 2018.
- Kolom keterangan yang diisi dengan status “Merah” atau “Hijau”.

Status Merah diterapkan jika peneliti sudah menerima 2 tugas pendampingan legislasi, 3 kali tugas pendampingan pengawasan, dan 4 tugas di Setjen dan BK DPR RI. Jika seorang peneliti belum memenuhi kondisi tersebut, maka statusnya adalah Hijau. Melalui adanya tabel tersebut, Koordinator Bidang dan Kepala Pusat Penelitian dapat secara cepat mengetahui distribusi tugas pendampingan pada tahun 2018. Informasi distribusi juga dapat memberikan gambaran apakah seorang peneliti nantinya bisa menerima penugasan tambahan dan mengerjakannya secara efektif.

Tabel tersebut kemudian diaplikasikan pada Data Pegawai di Website Portal DPR. Namun proses penerapan tabel ke dalam sistem ternyata mengalami kendala. Sistem pelaporan rekapitulasi yang dibuat belum dapat memberikan *warning system* yang berupa peringatan warna “Merah” atau “Hijau”. Solusi yang diberikan adalah menjumlahkan seluruh penugasan pendampingan pada kolom terakhir sebagai pengganti *warning system*. (Gambar 1-2)

Tahapan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi ini adalah menyerahkan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI kepada Koordinator Bidang. Sistem yang sudah dibuat dirasakan dapat membantu pemerataan distribusi tugas pendampingan dan membantu proses monitoring tugas tersebut (Lampiran Testimoni).

Jakarta, 27 September 2018

Mengetahui
Mentor

Peserta Latsar,
CPNS

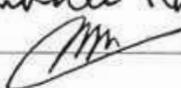


Achmad Sani Alhusain, SE., MA.
NIP. 197205111999031003



Masyithah Aulia Adhiem, M.E.
NIP. 198306032018012002

LEMBAR TESTIMONI

Nama	:	Masyithah Aulia Adhiem
Jabatan	:	Calon Peneliti
Judul Kegiatan Aktualisasi	:	Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI
Isi Testimoni	:	<p>Dengan adanya Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Tersebut, tentunya sangat membantu tugas Koordinasi Bidang dalam Penugasan di AKD, set-jen dan BK-DPR-RI. Dan tentunya Sistem akan dapat ditunjukkan pada tingkat kampu Lit. BK-DPR-RI.</p>
Tandatangan Pemberi Testimoni	:	<p>Mardiana Harta  20/09-2014.</p>